

SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pembangunan periode Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
- b. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Bab I memuat Pendahuluan;
 - b. Bab II memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Triwulan I Tahun 2025;
 - c. Bab III memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV memuat Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI memuat Penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Mei 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.	I-10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN	
TANGERANG TAHUN 2025 TRIWULAN I	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Triwulan I	II-1
2.2 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-5
2.3 Permasalahan Pelaksanaan Urusan dalam RKPD S.D Triwulan I.....	II-15
2.4 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-17
2.5 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Triwulan I.....	II-19
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN	
DAERAH..	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi Banten.....	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kab. Tangerang	III-3
3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.....	III-5
3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-10
3.1.5 Kemiskinan	III-15

3.1.6 Indeks Gini Rasio	III-17
3.1.7 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2025 pada P-RKPD 2025.....	III-18
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-20
3.2.1 Pendapatan Daerah	III-20
3.2.2 Belanja Daerah	III-22
3.2.3 Pembiayaan Daerah	III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025.....	IV-28
4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-35
4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-36
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025 ..	V-1
5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025	V-23
5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2025	V-34
5.4 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	V-40
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2	Perubahan Indikator Kinerja Utama Kab. Tangerang 2025 ..	II-4
Tabel 2.3	Perbandingan Struktur Anggaran RKPD, APBD, dan Penjabaran/Pergeseran Tahun 2025	II-5
Tabel 2.4	LRA Kabupaten Tangerang S/D Triwulan I Tahun 2025	II-7
Tabel 2.5	Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-9
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah Penghasil S/D Triwulan I Tahun 2025	II-12
Tabel 2.7	Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Per Urusa Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-16
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Triwulan I Tahun 2025.....	II-19
Tabel 2.9	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025	II-21
Tabel 2.10	Target dan Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2025	II-28
Tabel 2.11	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 ...	II-61
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2019-2024.....	III-7
Tabel 3.2	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam miliar Rupiah).....	III-7
Tabel 3.3	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah).....	III-9
Tabel 3.4	Persentase Penduduk diatas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023	III-12
Tabel 3.5	Capaian Tahun 2024 dan Proyeksi Indikator Makro Tahun 2025	

	pada P-RKPD 2025	III-19
Tabel 3.6	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2025	III-25
Tabel 4.1	Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ..	IV-4
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	IV-10
Tabel 4.3	Penyelarasan Prioritas Nasional dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025	IV-20
Tabel 4.4	Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030	IV-24
Tabel 4.5	Perbandingan Sasaran Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025- 2029 dengan RPJMD Kab. Tangerang Tahun 2025-2029	IV-30
Tabel 4.6	Interkoneksi Prioritas Daerah, Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional serta Target Indikator Sasaran Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.7	Capaian dan Target IKK Outcome Kabupaten Tangerang Tahun 2025	IV-40
Tabel 5.1	Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025	V-1
Tabel 5.2	Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025	V-1
Tabel 5.3	Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	V-2
Tabel 5.4	Rekapitulasi Program Prioritas Kab. Tangerang Tahun 2025	V-3
Tabel 5.5	Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2020-2025	V-23
Tabel 5.6	Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2025.....	V-26
Tabel 5.7	Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2025 Kab. Tangerang	V-26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
Gambar 3.1	Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025	III-2
Gambar 3.2	Prioritas Nasional Tahun 2025.....	III-3
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-6
Gambar 3.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	III-6
Gambar 3.5	Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024	III-8
Gambar 3.6	PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024	III-8
Gambar 3.7	PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023	III-10
Gambar 3.8	Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-10
Gambar 3.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	III-11
Gambar 3.10	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-11
Gambar 3.11	Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024.....	III-12
Gambar 3.12	Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023	III-12
Gambar 3.13	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	III-13
Gambar 3.14	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-13
Gambar 3.15	Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2023	III-14
Gambar 3.16	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-14
Gambar 3.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	III-14

Gambar 3.18	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-15
Gambar 3.19	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	III-15
Gambar 3.20	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-16
Gambar 3.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024	III-16
Gambar 3.22	Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-17
Gambar 3.23	Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	III-17
Gambar 3.24	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	III-18
Gambar 4.1	Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Tangerang	IV-2
Gambar 4.2	Keselaran Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2025	IV-3
Gambar 4.3	Program Prioritas RPJMD Kab. Tangerang Tahun 2025-2029	IV-17
Gambar 4.4	Penyelarasan Visi RPJMD dengan Visi RPJMN, RPJPN dan RPJPD Kabupaten Tangerang	IV-26
Gambar 4.5	Penyelarasan Misi RPJMD dengan Visi RPJMN, RPJPN dan RPJPD Kabupaten Tangerang	IV-26
Gambar 4.6	Program Unggulan yang Menjadi Program Prioritas	IV-27
Gambar 4.7	Penyelarasan Tema Pembangunan RKP Tahun 2025	IV-36
Gambar 4.8	Keselaran Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2025	IV-36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR
20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan titik awal pelaksanaan dokumen RPJPD Periode Tahun 2025-2045 dan titik akhir dokumen RPD 2024-2026 dikarenakan mulai berlakunya dokumen RPJMD 2025-2029, sebagaimana amanat ketentuan bahwa “Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025 2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.” Sementara Dokumen RPJMD Periode Tahun 2025-2029 saat ini masih berproses pada tahap Rancangan. Pada masa transisi peralihan Dokumen RPD ke Dokumen RPJMD, perlu dilakukan konversi terhadap target-target pembangunan daerah yang ditetapkan di RPD beralih ke RPJMD, sebagaimana yang telah disebutkan pada Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan RPJMD dan renstra PD Tahun 2025-2029 bahwa “Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.”

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 dan pedoman di dalam Menyusun dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kesatu tahun 2025, dirasa perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang telah dilantik pada 20 Februari 2025 maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik, serta keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RKPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANGERANG GEMILANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN” dengan 8 (delapan) misi pembangunan meliputi:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Perekonomian Daerah

Misi 5: Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Misi 6: Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7: Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh

Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko

RPJPD Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2025-2045 telah selaras dengan RPJPD Provinsi Banten Periode Tahun 2025-2045 dan RPJPN Periode Tahun 2025-2045.

Bahwasannya untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, terarah dan sistematis, maka penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada beberapa aturan yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih jauh daripada itu Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sendiri selain berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, juga berpedoman pada RKP serta pedoman umum penyusunan RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

Arab kebijakan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 difokuskan pada upaya “Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kolaborasi Antar Sektor”. Untuk dapat mencapai focus tersebut, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui

pendekatan top berorientasi bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Dokumen Perubahan RKPD ini mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 namun secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 dan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Dimana dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Periode Tahun 2025-2029 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029.
2. Dokumen Perubahan RKPD telah menyelaraskan target-target pembangunan pada Tahun Pertama Periode Pertama RPJPD Kabupaten Tangerang Periode Tahun 2025-2045.
3. Dokumen Perubahan RKPD merupakan proyeksi hasil evaluasi triwulan pertama RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dan merupakan Asumsi untuk menyesuaikan kondisi terkini.

Melalui dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang selalu tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui langkah-langkah inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian beberapa permasalahan di tahun 2025 yang terhimpun melalui pelaksanaan penanganan kolaborasi antar sektor dengan lokus desa dengan tingkat kesejahteraan rendah. Kolaborasi dilakukan untuk Penuntasan kemiskinan Ekstrem, stunting, dan pengangguran, Putus sekolah, Rumah Tidak Layak Huni, serta Sanitasi, Peningkatan Infrastruktur sekolah dan jalan. Selain itu penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melakukan Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita, Perubahan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

- ❖ Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan;
- ❖ Program makan Bergizi Gratis (MBG);
- ❖ Pencegahan *Stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- ❖ Pengendalian inflasi di daerah;
- ❖ Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- ❖ Dukungan swasembada pangan; dan
- ❖ Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitas dalam mempromosikan

- ❖ dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Selain itu penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 juga mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 maka Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut :

- a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga, dan ;
 - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD).
 - h. Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan :
 - ❖ Bidang Pendidikan;
 - ❖ Bidang Kesehatan;
 - ❖ Infrastruktur dan Sanitasi;
 - ❖ Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
 - ❖ Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - ❖ Penyediaan Cadangan Pangan; dan
 - ❖ Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
2. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan.

- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c) Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- d) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- e) Untuk ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) (outcome/output) yang ditetapkan, terintegrasi dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.
- f) Untuk ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) (outcome/output) yang ditetapkan, terintegrasi dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.
- g) Untuk kelangsungan Pemenuhan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), IKK, SDG's dan prioritas Pembangunan serta untuk mencapai indikator program.

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan Kabupaten Tangerang dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa yang menjadi dasar perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
4. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
6. Pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Non PNS;
7. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Banten

8. Belanja Operasional Perangkat Daerah yang harus dipenuhi selama dua belas bulan;
9. Penyesuaian belanja yang bersumber dari DAK sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Tahun 2025;
10. Pemenuhan target Program Prioritas dan Program Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029;
11. Perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi yang berdampak terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya pada perubahan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan serta penghapusan kegiatan
12. Perkembangan dilapangan yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

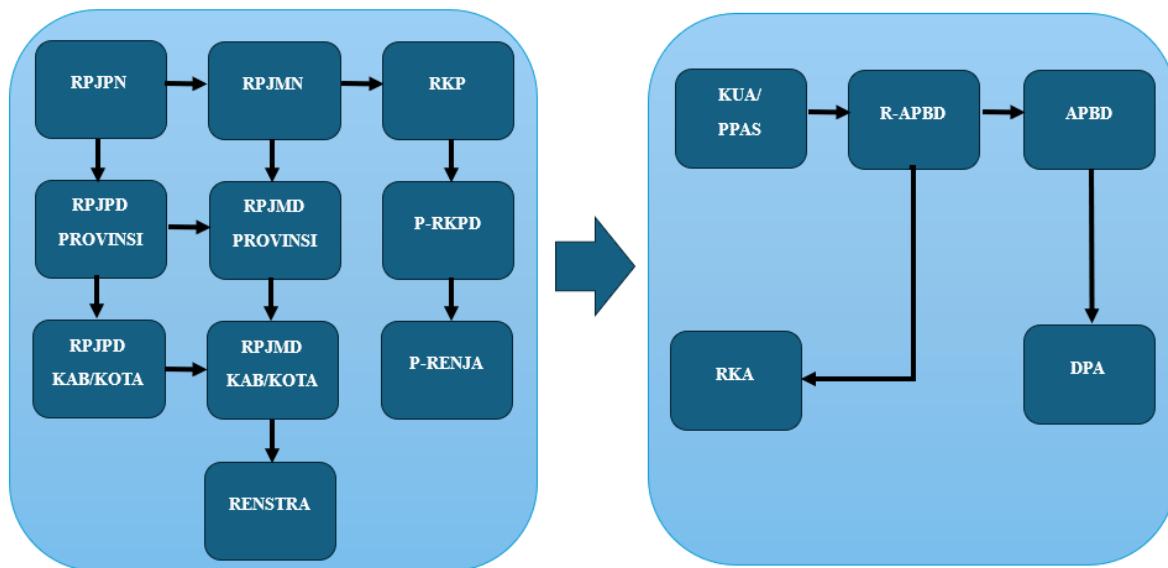
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Perubahan, yang diawali dengan Perubahan RKPD, KUPA dan Perubahan PPAS dan Perubahan RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Perubahan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hubungan antara Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



Untuk menjamin konsistensi perencanaan tahunan dan jangka menengah daerah RKPD tahun 2025 berpedoman pada RPD 2024-2026 dan Rancangan RPJMD 2025-2029, Dimana RPD 2024-2026 dan Rancangan RPJMD 2025-2029 sendiri disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya RKPD 2025 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA Perangkat Daerah. Selain hal tersebut dalam rangka sinergitas dan harmoni perencanaan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 juga menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan juga sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 antara Bupati dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Selain itu bahwa perubahan RKPD Tahun 2025 juga dimaksudkan untuk mengakomodir visi, misi dan program unggulan kepala daerah terpilih.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2025, adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025

yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2025.

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
4. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokmen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, sistematika dokumen perubahan RKPD dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TRIWULAN II TAHUN 2024

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan 2 tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan perubahan kerangka ekonomi dan perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan kedua dan target yang direncanakan untuk penuntasan target RPD Tahun 2024-2026 dimana tahun 2025 merupakan tahun kedua RPD dan tahun pertama pelaksanaan Rancangan RPJMD, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak tingkat daerah dengan mempertimbangkan kerangka

ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam Tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yg disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sampai triwulan pertama tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yg paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Ringkasan penjelasan hal-hal penting atas tahapan-tahapan sistematika penyajian pada bab-bab sebelumnya sehingga memberikan gambaran perencanaan tahunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang evaluasi pelaksanaan RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 serta dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagai bahan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Triwulan I

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama tiga tahun dalam RPD Kabupaten Tangerang tahun 2024–2026, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai RPD tahun 2024-2026 terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian			Target	Realisasi*
			2022	2023	2024	2025	Sampai dengan 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,18	5,00	5,05-5,30	5,77*
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,88	6,94	6,06	6,00	5,68**
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,92	6,93	6,55	6,90	6,56**
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,15	75,56	76,19	76,60	76,20**
5	Index Gini	Poin	0,282	0,286	0,269	0,260	0,265**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022-2025

Ket. * y-on-y triwulan 1 tahun 2025

** Perkiraan realisasi

Sampai dengan tahun 2025, kondisi ekonomi makro cenderung positif, baik pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, nilai tukar petani (NTP) bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang, melihat capaian laju PDRB Tahun 2025 (y-on-y) triwulan 1 untuk Provinsi Banten berada pada angka 5,19%, sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2025 triwulan 1 (y-on-y) sekitar 5,77% lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Banten, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan 1 tahun 2024 yang sebesar 4,11%, capaian triwulan 2025 lebih tinggi, dan jika dibandingkan dengan kondisi tahunan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang di triwulan 1 tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan kondisi tahun 2024 yang sekitar 5,00%.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2025 triwulan 1 sebesar 29.432,58 (miliar Rp.) sedangkan triwulan 1 pada tahun 2024 sebesar 27.827,58 (miliar Rp.) lebih besar capaian

triwulan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan tahunan pada tahun 2024 sebesar 113.998, 21 (miliar Rp.) Jika melihat laju pertumbuhan PDRB per sektor dari Provinsi Banten, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,62 persen, Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten, yang pada triwulan I-2025 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,51 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,62 persen; Konstruksi sebesar 4,43 persen; Real Estat sebesar 4,11 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,59 persen, jika sesuai data tersebut, maka kondisi pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang akan sesuai dengan Provinsi Banten, mengingat kontribusi PDRB di Provinsi Banten disumbang 30% dari Kabupaten Tangerang.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 16,42 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,48 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,82 persen, sedangkan , komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,28 persen dan 0,37 persen.

Sementara itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 13,77% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 3,76% dengan, kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja pemerintah di Kabupaten Tangerang yang semakin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja daerah memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlinsos. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,99 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1,06 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,77 persen. Sedangkan komponen PMTB dan komponen Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi masing-masing sebesar 24,69 persen dan 1,80 persen. Dari kondisi Provinsi Banten untuk komponen PMTB mengalami penurunan karena triwulan pertama pelaksanaan Pembangunan baru dilaksanakan.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 berada pada angka 6,06%, capaian Provinsi Banten untuk Tingkat Pengangguran Terbuka sekitar 6,64% kondisi bulan Februari tahun 2025, menurun dibandingkan tahun 2024, penurunan angka TPT di Provinsi Banten yang mencapai 0,38%, maka perkiraan penurunan angka TPT tahun 2025 sekitar 5,38%, dari tahun 2024. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang sekitar 6,06% atau sekitar 102.510 orang dengan 64.288 adalah laki-laki dan sekitar 38.222 adalah Perempuan, kategori pengangguran di Kabupaten Tangerang berupa mencari Pekerjaan sebanyak 88.756 orang, mempersiapkan usaha sebanyak 1.067 orang, dan merasa tidak mungkin mendapat Pekerjaan sebanyak 12.687 orang, dari segi Pendidikan jumlah yang paling banyak pengangguran

adalah lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 36.391 orang atau sekitar 35 persen dari angka pengangguran, sampai dengan bulan April 2025 angka pengangguran mengikuti angka 6,06 persen. Angka pengangguran cenderung menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,94 persen.

Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,55 persen, sedangkan angka kemiskinan tahun 2025 dari BPS belum rilis untuk Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang sekitar 266.430 orang. Dibandingkan 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 9.900 orang. Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 632,941 (Rp/Kap/bulan). Sekitar 43 persen penduduk miskin di Kabupaten Tangerang tidak memiliki Pekerjaan, 39,15 persen bekerja di sektor formal, dan yang bekerja disektor informal sebesar 17,81 persen. Penurunan angka kemiskinan merupakan keberhasilan program pemerintah berupa bantuan kepada Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Data index Gini pada tahun 2024, menurut data BPS Kabupaten Tangerang sekitar 0,269 poin, data ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tangerang masih ada ketimpangan, tetapi jika dibandingkan tahun 2023 ketimpangan ini cenderung menurun dan mendekati angka nol. Perbedaan karakteristik perkotaan dan perdesaan menjadikan angka gini rasio lebih besar dari nol atau tidak ada ketimpangan.

Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan tahun 2024 adalah 76,19 cenderung naik jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 75,56 poin, data tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 belum ada data dari BPS, dari angka tersebut capaian Pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat setiap tahun. Komposit indeks Pembangunan manusia terdiri dari angka rata-rata lama Sekolah (RLS), angka harapan lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH), pengeluaran perkapita, dari komposit IPM diatas kenaikan rata-rata lama Sekolah, lambatnya rata-rata lama Sekolah menggambarkan permasalahan dari segi akses, dan minat, walau Pendidikan negeri di Kabupaten Tangerang sudah digratiskan, dan beberapa usia sekolah yang melanjutkan sekolah dan atau ke pondok pesantren di luar Kabupaten Tangerang.

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator- indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang telah direncanakan. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	Target
				2025
-1	-2	-3	-4	-5
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	84,56	79,90
2	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	indeks	4,17	4,20
3	Indeks Professionalitas ASN	indeks	82,28	75,00
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	indeks	73,96	74,46
5	Nilai SAKIP	nilai	75,20	77,81
6	Indeks SPBE	indeks	3,91	4,01
7	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	indeks	99,8	91
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	persen (%)	5,00	5,05-5,30
9	Tingkat Inflasi	persen (%)	1,8	1,8 - 2,00
10	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	persen (%)	33,74	33,55 - 33,75
11	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	persen (%)	11,35	11,15 - 11,35
12	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	persen (%)	6,16	6,07 - 6,30
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	persen (%)	1,56	1,76
14	Indeks Kewirausahaan Daerah (Indeks) atau [Rasio Kewirausahaan Daerah]	indeks	2,09	2,69
15	Indeks Perkembangan Harga (indeks)	indeks	4,13	5,11
16	Persentase Penduduk Miskin (%) (Tingkat Kemiskinan)	persen (%)	6,55	6,05
17	Indeks Desa (Indeks)	indeks	0,7812	0,7830
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	persen (%)	65,88	68,08
19	Persentase PPKS yang Berdaya (%)	persen (%)	1,44	1,69
20	Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	75,34	77,70
21	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	indeks	0,79	0,79
22	Prevalensi Stunting	persen (%)	19,1	21,40
23	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	persen (%)	83,21 (2022)	98
24	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	64,71 (2023)	64,87
25	Indeks Pendidikan	indeks	0,68	0,68
26	Indeks Harmoni	indeks	7,06	7,09
27	Rata Rata Lama Sekolah	tahun	9,06	9,63/9,16
28	Harapan lama sekolah (tahun)	tahun	12,88	13,43/12,89
29	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	5,08 (2023)	5,11

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	Target
				2025
30	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	49,93 (2023)	52,00
31	Indeks Literasi Masyarakat	indeks	52,70	74,1
32	Indeks Karakter Masyarakat	indeks	NA	69,00
33	Indeks Kualitas Keluarga	indeks	NA	78,00
34	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	76,55 (2023)	78,00
35	Indeks Infrastruktur Dasar	indeks	NA	40,00
36	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	persen (%)	87,63 (2023)	96,00
37	Persentase RTH kawasan perkotaan (%)	persen (%)	NA	21,10
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	55,87	61,57
39	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0.74	0,70
40	Penurunan Intensitas Emisi GRK - Tahunan (%)	persen (%)	NA	8,90
41	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	persen (%)	63,91	65,59
42	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	persen (%)	2,59 (2023)	2,20
43	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	indeks	77,6	78,16

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Kab. Tangerang

2.2 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.3
Perbandingan Struktur Anggaran RKPD, APBD, dan Penjabaran/Pergeseran Tahun 2025

Kode	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN					
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.258.081.977.638,00	4.681.265.325.888,00	4.681.265.325.888,00	1.002.275.031.567,70	21,41
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	3.364.000.000.000,00	3.763.500.000.000,00	3.763.500.000.000,00	787.212.998.367,00	20,92
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	171.332.818.267,00	173.297.291.886,00	173.297.291.886,00	46.640.589.313,00	26,91
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59.337.374.891,00	60.509.521.940,00	60.509.521.940,00	0,00	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	663.411.784.480,00	683.958.512.062,00	683.958.512.062,00	168.421.443.887,70	24,62
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.270.737.309.887,00	3.548.978.636.887,00	3.543.189.648.887,00	780.413.568.561,00	21,99
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	291.217.360.000,00	3.190.458.687.000,00	3.184.669.699.000,00	566.894.880.659,00	17,77

Kode	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Realisasi	%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887,00	358.519.949.887,00	358.519.949.887,00	213.518.687.902,00	59,56
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		7.528.819.287.525,00	8.230.243.962.775,00	8.224.454.974.775,00	1.782.688.600.128,70	21,66
5	BELANJA DAERAH					
05.01	BELANJA OPERASI	6.362.456.385.597,00	6.267.103.555.261,03	6.167.620.709.069,03	1,131,411,142,776,00	18,62
05.01.01	Belanja Pegawai	2.729.966.172.289,00	2.783.330.402.162,79	2.783.330.402.162,79	608.850.618.316,00	23,09
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3.501.651.342.969,00	3.108.429.484.973,24	2.998.146.638.781,24	466.440.031.826,00	15,03
05.01.05	Belanja Hibah	122.638.870.339,00	356.074.068.125,00	365.574.068.125,00	57,113,179,625,00	16,04
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	8.200.000.000,00	19.269.600.000,00	20.569.600.000,00	00,00	0,00
05.02	BELANJA MODAL	641.664.779.191,00	1.363.427.081.497,97	1.465.120.939.689,97	89.923.547.324,00	6,60
05.02.01	Belanja Modal Tanah	45.157.046.000,00	106.598.843.340,00	106,598,843,340,00	00,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.250.002.225,00	372.609.434.585,00	381.563.279.033,00	22.445.593.303,00	6,02
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	209.610.501.560,00	359.108.873.878,40	446.709.482.297,40	5,842,524,892,00	1,63
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.528.295.036,00	500.918.129.984,57	506.057.535.309,57	61,520,631,129,00	12,28
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	23.551.895.500,00	23.551.895.500,00	00,00	0,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	118.934.370,00	639.904.210,00	639,904,210,00	114,798,000,00	17,94
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	30,000,000,000,00	22,000,000,000,00	1.165.958.737,00	3,89
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000,00	30,000,000,000,00	22,000,000,000,00	1,165,958,737,00	3,89
05.04	BELANJA TRANSFER	864.698.122.737,00	939.713.326.016,00	939,713,326,016,00	476.481.677.097,00	47,36
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	347.519.394.437,00	388.414.633.516,00	388,414,633,516,00	229,651,406,110,00	51,02
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	517.178.728.300,00	551.298.692.500,00	551,298,692,500,00	246.830.270.987,00	44,77
	JUMLAH BELANJA DAERAH	7.898.819.287.525,00	8.600.243.962.775,00	8.594.454.974.775,00	1.699.975.012.925,00	19,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(370,000,000,000,00)	(370,000,000,000,00)	(370,000,000,000,00)	79.543.185.775,70	(21,50)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400,000,000,000,00	400,000,000,000,00	400,000,000,000,00	00,00	0,00%
06.01.01	Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	400,000,000,000,00	400,000,000,000,00	400,000,000,000,00	00,00	0,00%

Kode	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Realisasi	%
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	00.00	0.00%
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	00.00	0.00%
06.02.03	Pemberian Pinjaman Daerah	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	00.00	0.00%
PEMBIAYAAN NETTO		37.000.000.000.000,00	37.000.000.000.000	37.000.000.000.000	00.00	0.00%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					79.543.185.775,70	

Sumber : BPKAD

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.4
LRA Kabupaten Tangerang S.D Triwulan I Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	Penjabaran/ Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00	4.681.265.325.888,00	-	1.002.275.031.567,70	21,41
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00	3.763.500.000.000,00	-	787.212.998.367,00	20,92
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886,00	173.297.291.886,00	-	46.640.589.313,00	26,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940,00	60.509.521.940,00	-	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.548.978.636.887,00	3.543.189.648.887,00	(5.788.988.000,00)	780.413.568.561,00	21,99
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.190.458.687.000,00	3.184.669.699.000,00	(5.788.988.000,00)	566.894.880.659,00	17,77
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887,00	358.519.949.887,00	-	213.518.687.902,00	59,56
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	8.230.243.962.775,00	8.224.454.974.775,00	(5.788.988.000,00)	1.782.688.600.128,70	21,66
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	6.267.103.555.261,03	6.167.620.709.069,03	(99.482.846.192,00)	1.167.037.647.395,00	18,62
5.1.01	Belanja Pegawai	2.783.330.402.162,79	2.783.330.402.162,79	-	642.787.018.557,00	23,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.429.484.973,24	2.998.146.638.781,24	(110.282.846.192,00)	467.137.449.213,00	15,03
5.1.05	Belanja Hibah	356.074.068.125,00	365.574.068.125,00	9.500.000.000,00	57.113.179.625,00	16,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.269.600.000,00	20.569.600.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.363.427.081.497,97	1.465.120.939.689,97	101.693.858.192,00	89.923.547.324,00	6,60

KODE	URAIAN	APBD 2025	Penjabaran/ Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340,00	106.598.843.340,00	-	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.609.434.585,00	381.563.279.033,00	8.953.844.448,00	22.445.593.303,00	6,02
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.108.873.878,40	446.709.482.297,40	87.600.608.419,00	5.842.524.892,00	1,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.918.129.984,57	506.057.535.309,57	5.139.405.325,00	61.520.631.129,00	12,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500,00	23.551.895.500,00	-	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	639.904.210,00	639.904.210,00	-	114.798.000,00	17,94
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	1.165.958.737,00	3,89
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	1.165.958.737,00	3,89
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	1.165.958.737,00	3,89
5.4	BELANJA TRANSFER	939.713.326.016,00	939.713.326.016,00	-	445.018.260.897,00	47,36
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	388.414.633.516,00	388.414.633.516,00	-	198.187.989.910,00	51,02
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500,00	551.298.692.500,00	-	246.830.270.987,00	44,77
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.600.243.962.775,00	8.594.454.974.775,00	(5.788.988.000,00)	1.703.145.414.353,00	19,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(370.000.000.000,00)	(370.000.000.000,00)	-	79.543.185.775,70	(21,50)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	317.647.451.336,00	317.647.451.336,00	-	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	82.352.548.664,00	82.352.548.664,00	-	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0,00	0,00
6.2.04.05	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	370.000.000.000,00	370.000.000.000,00	-	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)			79.543.185.775,70	0,00

Hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 memperlihatkan kondisi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar

19,59 %, sedangkan untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah APBD Tahun 2025 sebesar 19,78 %.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2025:

- Jumlah Program 311
- Jumlah Kegiatan 749
- Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 3420
- Jumlah OPD 62 OPD
- Pagu Belanja Daerah : Rp 8.594.454.974.775,00

Adapun realisasi anggaran belanja setiap Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

No	SKPD	Keuangan					FISIK	
		APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Dinas Pendidikan	2.168.955.692.156,00	2.177.937.080.969,00	8.981.388.813,00	306.204.282.341,00	14,12	20,07	
2	Dinas Kesehatan	1.839.656.653.500,00	1.876.459.368.030,00	36.802.714.530,00	392.616.844.672,00	21,34	23,59	
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	462.805.005.858,00	466.776.025.053,00	3.971.019.195,00	56.921.436.564,00	12,30	25	
4	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	369.351.115.687,00	379.889.690.830,00	10.538.575.143,00	10.004.483.462,00	2,71	25	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.871.119.801,00	43.369.043.801,00	(502.076.000,00)	7.411.672.939,00	16,89		
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	359.117.406.681,00	356.864.665.726,00	(2.252.740.955,00)	7.930.629.014,00	2,21		
7	Satuan Polisi Pamong Praja	37.063.200.873,00	35.484.232.298,00	(323.633.174.383,00)	8.663.596.020,00	23,38	17,72	
8	Dinas Sosial	69.268.354.563,00	76.166.823.382,00	39.103.622.509,00	4.369.416.519,00	6,31	23,16	
9	Dinas Tenaga Kerja	39.668.666.822,00	40.018.736.862,00	(29.249.617.701,00)	5.563.345.227,00	14,02	36,86	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.539.442.654,00	17.096.084.614,00	(22.572.582.208,00)	4.109.312.726,00	22,17	24,97	
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	230.564.007.766,00	228.024.641.176,00	209.485.198.522,00	34.493.754.545,00	14,96	24,39	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.333.640.489,00	39.490.854.887,00	(191.073.152.879,00)	6.627.624.139,00	16,03	20,42	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.525.151.892,00	46.608.235.692,00	(1.916.916.200,00)	7.598.721.301,00	15,66	25	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.800.288.885,00	46.693.431.122,00	(1.831.720.770,00)	8.813.687.326,00	18,44	23,37	
15	Dinas Perhubungan	112.081.047.278,00	112.035.550.903,00	(45.496.375,00)	18.762.327.599,00	16,74	25	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.135.850.043,00	83.760.409.523,00	(1.375.440.520,00)	15.811.236.165,00	18,57	23,96	

No	SKPD	Keuangan					FISIK	
		APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	32.489.233.631,00	30.712.313.288,00	(1.776.920.343,00)	5.292.081.539,00	16,29	24,59	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.685.815.142,00	25.307.188.787,00	(1.378.626.355,00)	6.123.476.496,00	22,95	23,77	
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	53.519.492.958,00	51.658.685.798,00	(1.860.807.160,00)	11.733.308.249,00	21,92	24,87	
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23.347.565.292,00	22.481.932.537,00	(865.632.755,00)	4.988.453.760,00	21,37	26,47	
21	Dinas Perikanan	28.671.195.500,00	29.499.737.092,00	828.541.592,00	6.406.117.926,00	22,34	31,44	
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.673.315.531,00	67.581.158.459,00	5.907.842.928,00	12.517.578.804,00	20,30	24,96	
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.620.223.738,00	22.480.956.755,00	(139.266.983,00)	5.657.272.356,00	25,01	23,98	
24	Sekretariat Daerah	219.420.416.672,00	230.826.014.162,00	11.405.597.490,00	66.973.862.301,00	30,52	24,09	
25	Sekretariat DPRD	144.097.518.813,00	116.687.994.513,00	(27.409.524.300,00)	28.445.355.371,00	19,74	23,04	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.902.646.111,00	43.143.127.351,00	(3.759.518.760,00)	7.491.675.965,00	15,97	20	
27	Badan Pendapatan Daerah	123.959.296.973,00	121.681.951.873,00	(2.277.345.100,00)	15.363.059.080,00	12,39	40,51	
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.282.119.994,00	45.650.816.424,00	(2.631.303.570,00)	10.841.772.056,00	22,46	24,95	
29	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	969.713.326.016,00	961.713.326.016,00	(8.000.000.000,00)	446.184.219.634,00	46,01	38	
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.138.187.964,00	35.610.077.850,00	(1.528.110.114,00)	6.705.569.521,00	18,06	25	
31	Inspektorat Kabupaten	57.855.198.017,00	51.940.972.317,00	(5.914.225.700,00)	11.170.727.603,00	19,31	25	
32	Kecamatan Tigaraksa	34.795.485.273,00	34.101.958.934,00	(693.526.339,00)	8.382.249.362,00	24,09	24,17	
33	Kecamatan Cikupa	29.364.821.059,00	28.625.457.349,00	(739.363.710,00)	8.079.772.614,00	27,52	24,82	
34	Kecamatan Panongan	25.870.141.642,00	25.309.281.917,00	(560.859.725,00)	4.732.808.630,00	18,29	24,88	
35	Kecamatan Curug	36.524.785.261,00	35.626.325.061,00	(898.460.200,00)	7.363.863.035,00	20,16	24,54	
36	Kecamatan Legok	24.631.554.828,00	24.023.336.413,00	(608.218.415,00)	4.630.353.708,00	18,80	25	
37	Kecamatan Pasar Kemis	46.221.671.658,00	45.360.972.828,00	(860.698.830,00)	12.533.212.225,00	27,12	24,17	
38	Kecamatan Balaraja	22.419.038.340,00	21.935.882.340,00	(483.156.000,00)	4.631.483.206,00	20,66	25	
39	Kecamatan Kresek	16.634.510.132,00	16.162.491.852,00	(472.018.280,00)	4.428.787.197,00	26,62	25	
40	Kecamatan Kronjo	17.692.790.337,00	17.189.668.337,00	(503.122.000,00)	5.177.743.262,00	29,26	25	

No	SKPD	Keuangan					FISIK	
		APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41	Kecamatan Mauk	20.494.391.880,00	20.589.171.337,00	94.779.457,00	4.834.340.638,00	23,59	24,94	
42	Kecamatan Rajeg	31.449.254.733,00	30.851.737.283,00	(597.517.450,00)	6.425.528.710,00	20,43	23,15	
43	Kecamatan Sepatan	26.356.932.549,00	25.898.072.849,00	(458.859.700,00)	5.024.595.894,00	19,06	24,11	
44	Kecamatan Teluknaga	22.865.085.379,00	22.383.222.379,00	(481.863.000,00)	5.948.382.918,00	26,02	25	
45	Kecamatan Cisoka	17.562.807.678,00	16.867.639.078,00	(695.168.600,00)	3.563.425.863,00	20,29	24,75	
46	Kecamatan Pakuhaji	25.203.238.105,00	24.411.210.505,00	(792.027.600,00)	3.275.866.819,00	13,00	23,84	
47	Kecamatan Kosambi	28.682.058.057,00	27.817.884.507,00	(864.173.550,00)	4.765.239.799,00	16,61	12,96	
48	Kecamatan Pagedangan	26.964.129.080,00	26.425.153.880,00	(538.975.200,00)	4.685.412.665,00	17,38	24,7	
49	Kecamatan Jambe	16.637.083.822,00	16.228.643.002,00	(408.440.820,00)	4.637.710.358,00	27,88	25	
50	Kecamatan Jayanti	13.501.105.307,00	13.097.073.907,00	(404.031.400,00)	2.465.380.056,00	18,26	25	
51	Kecamatan Kemiri	15.060.616.816,00	14.530.081.141,00	(530.535.675,00)	2.165.820.241,00	14,38	25	
52	Kecamatan Sukadiri	14.526.222.431,00	14.146.952.861,00	(379.269.570,00)	2.534.585.168,00	17,45	22,92	
53	Kecamatan Cisauk	23.060.107.845,00	22.437.418.277,00	(622.689.568,00)	4.284.865.506,00	18,58	25	
54	Kecamatan Sepatan Timur	23.456.348.947,00	23.018.207.597,00	(438.141.350,00)	4.717.184.448,00	20,11	25	
55	Kecamatan Sindang Jaya	20.017.117.416,00	19.449.633.131,00	(567.484.285,00)	4.212.443.054,00	21,04	25	
56	Kecamatan Kelapa Dua	47.214.475.059,00	46.070.911.159,00	(1.143.563.900,00)	11.766.953.013,00	24,92	24,62	
57	Kecamatan Solear	18.991.417.246,00	18.712.563.396,00	(278.853.850,00)	3.337.995.760,00	17,58	25	
58	Kecamatan Mekar Baru	17.660.225.622,00	17.003.806.962,00	(656.418.660,00)	4.323.216.895,00	24,48	24,85	
59	Kecamatan Sukamulya	14.930.071.430,00	14.459.911.880,00	(470.159.550,00)	3.329.700.821,00	22,30	25	
60	Kecamatan Gunung Kaler	18.730.135.049,00	18.116.737.439,00	(613.397.610,00)	4.634.513.939,00	24,74	25	
61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.614.142.494,00	29.952.439.084,00	(2.661.703.410,00)	10.455.077.329,00	32,06	25	
JUMLAH		8.600.243.962.775,00	8.594.454.974.775,00	(5.788.988.000,00)	1.703.145.414.353,00	19,80	24,87	

Sumber : BPKAD,

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 24,87% dan capaian anggaran sebesar 19,80%.

Adapun hasil evaluasi masing masing Perangkat Daerah Penghasil dengan menyandingkan Target Pendapatan Daerah pada Penjabaran APBD TA. 2025 dan Penjabaran Penyesuaian/Pergeseran APBD TA. 2025 dengan LRA s/d Triwulan I atau LRA Progres Terkini TA. 2025 yang bisa dilihat dengan lebih detilnya pada tabel di bawah ini;

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah Penghasil S.D Triwulan I
Tahun 2025

NO	Uraian	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
1	Dinas Kesehatan	6.569.361.920,00	6.569.361.920,00	-	1.293.632.548,00	19,69%
2	BLUD Puskesmas Rajeg	4.235.000.000,00	4.235.000.000,00	-	1.085.373.525,00	25,63%
3	BLUD Puskesmas Teluknaga	3.917.981.813,00	3.917.981.813,00	-	1.044.514.979,00	26,66%
4	BLUD Puskesmas Kronjo	4.057.522.956,00	4.057.522.956,00	-	996.926.619,00	24,57%
5	BLUD Puskesmas Sindang Jaya	3.652.191.882,00	3.652.191.882,00	-	915.897.723,00	25,08%
6	BLUD Puskesmas Curug	3.616.200.000,00	3.616.200.000,00	-	983.447.440,00	27,20%
7	BLUD Puskesmas Cikupa	3.885.961.000,00	3.885.961.000,00	-	926.471.571,00	23,84%
8	BLUD Puskesmas Mauk	6.181.123.000,00	6.181.123.000,00	-	1.666.387.828,00	26,96%
9	BLUD Puskesmas Balaraja	3.789.000.000,00	3.789.000.000,00	-	881.169.332,00	23,26%
10	BLUD Puskesmas Kutabumi	3.977.000.000,00	3.977.000.000,00	-	989.602.440,00	24,88%
11	BLUD Puskesmas Sepatan	5.818.140.000,00	5.818.140.000,00	-	1.472.630.793,00	25,31%
12	BLUD Puskesmas Cikuya	4.227.136.498,00	4.227.136.498,00	-	1.125.504.061,00	26,63%
13	BLUD Puskesmas Cisoka	4.947.136.453,00	4.947.136.453,00	-	1.240.302.199,00	25,07%
14	BLUD Puskesmas Gembong	2.203.200.000,00	2.203.200.000,00	-	570.962.463,00	25,92%
15	BLUD Puskesmas Kelapa Dua	2.495.940.124,00	2.495.940.124,00	-	716.094.400,00	28,69%
16	BLUD Puskesmas Kedaung Barat	4.342.367.579,00	4.342.367.579,00	-	1.107.085.262,00	25,49%
17	BLUD Puskesmas Jambe	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	-	788.093.180,00	24,88%

NO	Uraian	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
18	BLUD Puskesmas Jalan Emas	1.660.000.000,00	1.660.000.000,00	-	408.557.152,00	24,61%
19	BLUD Puskesmas Pagedangan	3.325.037.500,00	3.325.037.500,00	-	884.207.346,00	26,59%
20	BLUD Puskesmas Jayanti	3.012.305.000,00	3.012.305.000,00	-	776.091.113,00	25,76%
21	BLUD Puskesmas Pakuhaji	4.391.776.230,00	4.391.776.230,00	-	1.057.354.490,00	24,08%
22	BLUD Puskesmas Pasir Nangka	2.571.600.000,00	2.571.600.000,00	-	696.434.091,00	27,08%
23	BLUD Puskesmas Sukamulya	3.115.000.000,00	3.115.000.000,00	-	804.142.689,00	25,82%
24	BLUD Puskesmas Sukadiri	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	-	685.466.070,00	26,26%
25	BLUD Puskesmas Tigaraksa	3.932.540.000,00	3.932.540.000,00	-	1.055.581.961,00	26,84%
26	BLUD Puskesmas Kresiek	3.383.260.513,00	3.383.260.513,00	-	891.404.144,00	26,35%
27	BLUD Puskesmas Binong	1.782.500.000,00	1.782.500.000,00	-	432.628.616,00	24,27%
28	BLUD Puskesmas Bojong Kamal	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	474.219.646,00	26,35%
29	BLUD Puskesmas Bojong Nangka	1.706.778.000,00	1.706.778.000,00	-	568.593.821,00	33,31%
30	BLUD Puskesmas Cisauk	2.241.148.710,00	2.241.148.710,00	-	545.823.159,00	24,35%
31	BLUD Puskesmas Gunung Kaler	3.071.914.000,00	3.071.914.000,00	-	789.234.918,00	25,69%
32	BLUD Puskesmas Jalan Kutai	990.448.637,00	990.448.637,00	-	241.366.234,00	24,37%
33	BLUD Puskesmas Kemiri	3.644.065.600,00	3.644.065.600,00	-	889.967.288,00	24,42%
34	BLUD Puskesmas Kosambi	2.499.515.719,00	2.499.515.719,00	-	642.461.524,00	25,70%
35	BLUD Puskesmas Legok	2.755.049.000,00	2.755.049.000,00	-	713.553.420,00	25,90%

NO	Uraian	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
36	BLUD Puskesmas Mekar Baru	2.414.746.237,00	2.414.746.237,00	-	628.662.889,00	26,03%
37	BLUD Puskesmas Panongan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-	832.505.793,00	24,49%
38	BLUD Puskesmas Pasir Jaya	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	454.558.803,00	25,25%
39	BLUD Puskesmas Salembaran Jaya	1.712.739.000,00	1.712.739.000,00	-	474.465.403,00	27,70%
40	BLUD Puskesmas Sukatani	3.308.320.285,00	3.308.320.285,00	-	849.827.579,00	25,69%
41	BLUD Puskesmas Sukawali	2.408.991.189,00	2.408.991.189,00	-	671.378.340,00	27,87%
42	BLUD Puskesmas Suradita	2.414.966.482,00	2.414.966.482,00	-	587.802.325,00	24,34%
43	BLUD Puskesmas Tegal Angus	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	649.708.658,00	24,06%
44	BLUD Puskesmas Pasar Kemis	2.373.150.000,00	2.373.150.000,00	-	615.783.668,00	25,95%
45	RSUD Pakuhaji	33.904.555.000,00	33.904.555.000,00	-	7.192.478.236,00	21,21%
46	BLUD Puskesmas Caringin	1.331.100.000,00	1.331.100.000,00	-	404.102.437,00	30,36%
47	RSUD Balaraja	162.100.000.000,00	162.100.000.000,00	-	40.467.863.129,00	24,96%
48	RSUD Kabupaten Tangerang	318.884.600.000,00	318.884.600.000,00	-	87.471.619.040,00	27,43%
49	BLUD Labkesda	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	926.797.300,00	54,52%
50	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00	-	19.201.770.370,00	22,59%
51	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	800.000.000,00	800.000.000,00	-	217.817.500,00	27,23%
52	Dinas Tenaga Kerja	17.856.000.000,00	17.856.000.000,00	-	6.531.843.000,00	36,58%
53	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.943.600.000,00	4.943.600.000,00	-	1.231.283.730,00	24,91%
54	Dinas Perhubungan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	2.410.000,00	0,60%

NO	Uraian	APBD 2025	Penjabaran/Pergeseran	Selisih	Realisasi SD TW I	%
55	UPT Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	4.281.324.648,00	4.281.324.648,00	-	1.358.333.807,70	31,73%
56	Dinas Perikanan	576.413.239,00	576.413.239,00	-	92.986.390,00	16,13%
57	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.960.000,00	150.960.000,00	-	24.140.500,00	15,99%
58	Badan Pendapatan Daerah	3.773.500.000.000,00	3.773.500.000.000,00	-	793.114.575.276,00	21,02%
59	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.218.135.734,00	28.218.135.734,00	-	1.025.630.024,00	3,63%
60	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4.054.488.158.827,00	4.048.699.170.827,00	(5.788.988.000,00)	787.298.971.886,00	19,42%

2.3 Permasalahan Pelaksanaan Urusan dalam RKPD S.D Triwulan I

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh OPD yang kinerjanya belum maksimal pada Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Adanya peralihan pengadaan melalui e- catalog dari versi 5 ke versi 6;
2. Penggunaan Aplikasi SIPD pada tahap penatausahaan belum efektif sehingga masih menggunakan kembali Aplikasi Quarta yang menyebabkan perlu dilakukannya input ulang semua transaksi yang dilakukan pada aplikasi Quarta ke SIPD, sehingga menghambat proses pencairan anggaran.
3. Adanya instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan negara dan anggaran pendapatan Daerah tahun anggran 2025.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Provinsi Banten dan sumber dana lainnya seperti CSR, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi perangkat daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian

- kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini;
2. Perlunya percepatan sosialisasi tentang peralihan pengadaan e catalog dari versi 5 ke versi 6 kepada seluruh OPD
 3. Perlunya kolaborasi antar OPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset/BMD secara reguler dan menciptakan peluang untuk meningkatkan PAD.
 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yg cermat dengan berbasis kebutuhan

Tabel 2.7
Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Per Urusan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	BIDANG/URUSAN	CAPAIAN KINERJA	ALASAN	SOLUSI
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	19,57%	1. Belum tersedianya data yang valid mengenai jumlah anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan dapat segera ditindaklanjuti dengan dukungan dari Pemda sebagai calon peserta pendidikan kesetaraan 2. Belum optimalnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan analisis data dan kesenjangan yang meliputi data sarana prasarana, data pendidik dan tenaga kependidikan serta data kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah	Dilakukan Updating Data secara berkala
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,23%	Proses lelang mundur dikarenakan perencanaan belum selesai baik RAB dan lain sebagainya juga ada refocusing	Membuat rencana tindak lanjut yang terstruktur dan terukur
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11,20%	Kegiatan fisik baru akan dimulai di Triwulan II dan III	Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13,31%	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan cash budget yang direncanakan	Peningkatan lagi dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran agar lebih maksimal
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11,07%	Rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian dan konsumsi pangan belum beragam, bergizi dan seimbang	sosialisasi dan pelatihan petani milenial dan pemanfaatan lahan pekarangan, sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan B2SA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	7,59%	Kegiatan fisik baru akan dimulai di Triwulan II dan III	Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	12,75%	1. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Triwulan pertama tahun 2025 secara umum yaitu pengumpulan data oleh Perangkat daerah yang lambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan dari Perangkat Daerah untuk mengumpulkan data sektoral di masing-masing bidang.	1. Melakukan penyampaian progress keterisian kepada Perangkat Daerah untuk percepatan pengumpulan data statistik sektoral. 2. Koordinasi yang intens dengan instansi vertikal terkait ketersediaan data untuk penyusunan Buku Profil ST.

NO	BIDANG/URUSAN	CAPAIAN KINERJA	ALASAN	SOLUSI
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	10,29%	1. Perlunya Pedoman Hukum yang mengatur Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Kabupaten Tangerang. 2. Kurangnya pemerataan kompetensi SDM yang menguasai teknis pengamanan informasi dan persandian. 3. Kurangnya jumlah personil SDM pengelola keamanan informasi dan persandian sehingga pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi masih belum efektif dan efisien	Adapun tindak lanjut dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 adalah perlu terus dilakukan sosialisasi, bimtek, serta pembinaan kepada seluruh pranata komputer di seluruh perangkat daerah agar dapat memahami pentingnya pengamanan data dan informasi pada unit kerjanya masing-masing.
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10,07%	Kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya	Kedepannya akan lebih matang dalam perencanaan dan penganggaran
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	11,44%	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan cash budget yang direncanakan	Peningkatan lagi dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran agar lebih maksimal
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8,08%	Kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya	Kedepannya akan lebih matang dalam perencanaan dan penganggaran
12	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,89%	Kegiatan pada program Pengembangan Sumberdaya Manusia pada urusan Pendidikan dan Pelatihan tidak ada permasalahan dikarenakan semua kegiatan blm dilaksanakan krn cashbudget br ada di tw 2	Agar lebih ditingkatkan lagi dalam perencanaan dan penganggaran

2.4 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang di hadapi antara lain ;

a. Bidang Pendidikan

Permasalahan pada Bidang Pendidikan di tahun 2025 adalah;

1. Kebutuhan peserta didik terhadap ruang kelas masih belum ideal
2. Rendahnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
3. Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal merupakan salah satu faktor penyebab utama anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin belum mendapatkan layanan pendidikan di PAUD ataupun di SD/MI.
4. Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku dan Pemda perlu memastikan kecukupan tersebut.
5. Kemampuan SDM dalam menganalisis rapor pendidikan ke dalam program kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SPM masih terbatas

b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Bidang Penataan Ruang di tahun 2025 adalah;

1. Status kepemilikan jalan untuk Pembanangunan jalan

2. Koordinasi lintas OPD terkait pembangunan jalan (ruas jalan yang di rencanakan di bangun beririsan dngan kegiatan opd lain)
 3. Keterhambatan dalam proses lelang dikarenakan masih menyesuaikan penyusunan perencanaan RAB akibat adanya instruksi mengenai efisiensi anggaran
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Permasalahan pada Bidang Penataan Ruang di tahun 2025 adalah;
1. Banyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang belum menjadi asset pemda sehingga tidak dapat direalisasikan;
 2. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakaf dan TPU milik pemda.
 3. Rendahnya kesadaran Pengembang untuk menyerahkan PSU.
- d. Bidang Sosial
1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS
 2. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan cash budget dan terget yang ditetapkan
- e. Bidang Pangan
1. Konsumsi Pangan belum beragam, bergizi dan seimbang
 2. Peningkatan pencegahan penyakit menular & zoonosis.
 3. Rendahnya minat anak muda untuk berusaha di sector pertanian
- f. Bidang Pertanahan
1. Masih adanya permasalahan yang belum sepakat antara harga penjual dan harga yang di tetapkan oleh tim apresial
- g. Bidang Statistik
1. Masih kesulitan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengumpulkan data sektoral
- h. Bidang Persandian
1. Kurangnya jumlah personil SDM pengelola keamanan informasi dan persandian sehingga pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi masih belum efektif dan efisien
- i. Bidang Kebudayaan
1. Belum optimalnya pembinaan terhadap wirausahawan muda pada setiap wilayah Kecamatan.
- j. Bidang Kearsipan
1. Perhatian peningkatan kompetensi arsiparis (diklat, bimtek, ukom) masih terbatas.
- k. Bidang Pariwisata
1. belum optimalnya sarana dan prasarana pada objek destinasi pariwisata di Kabupaten Tangerang.

1. Bidang Pelatihan

1. Terdapat perubahan metode pelatihan dari yang telah direncanakan secara klasikal menjadi Blended learning sehingga berpengaruh pada indek biaya pelatihan.
2. Sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II

2.5 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Triwulan I

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 5 Tujuan Daerah dengan 5 Indikator dan 14 Sasaran Daerah dengan 14 indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Triwulan I Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan I 2025
1	Indeks Pendidikan	indeks	0,68	0,7	0,68
2	Indeks Kesehatan	indeks	0,77	0,79	0,851
3	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	50,13	53	52,13*
4	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	62,17	63,17	63,84*
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,47	1,15	1,25
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	indeks	2,02	2,26	1
7	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	persen	2,28	3,48	-0,28
8	Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	persen	N/A	5,12	-11,5
9	Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	persen	20,45	26,52	28,83
10	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	3,25	3,57	2,6
11	Indeks Desa Membangun	indeks	0,7207	0,7407	0,78
12	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	77,00	78,00	77,6
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	67,05	67,85	65,88
14	Persentase PPKS yang Berdaya	persen	N/A	1,69	1,48
15	Nilai SAKIP	point	72,68	78	75,2
16	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	indeks	0,505	0,525	0,53
17	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP
18	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	57,45	75	82,28
19	Maturitas SPIP Terintegrasi	point	3	3	3
20	Indeks SPBE	indeks	3,08	3,19	3,91

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan I 2025
21	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,12	4,3	4,17
22	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	92,95	95	97
23	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	persen	8	55	37
24	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	point	0,9433	0,9442	0,9453
25	Rasio Konektivitas Kabupaten	point	0,75	0,81	0,4
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	55,88	56,89	55,87
27	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	indeks	130,45	115	125,22
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	N/A	78	-
29	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	92,95	95	97
30	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	persen	8	55	37
31	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	point	0,9433	0,9442	0,9453
32	Rasio Konektivitas Kabupaten	point	0,75	0,81	0,4
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	55,88	56,89	55,87
34	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	indeks	130,45	115	125,22

Sumber : LAKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Hasil rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tangerang triwulan I tahun 2025 yang sudah terisi realisasi indikator masih berdasarkan realisasi 2024. Adapun tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Daerah Kabupaten Tangerang pada triwulan 1 tahun 2025 masih belum ada realisasi, karena indikator tujuan dan sasaran merupakan indikator outcome yang terlaksana jika program, kegiatan dan sub kegiatan sudah dilaksanakan.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran

pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang telah direncanakan, tahun 2025 merupakan tahun ke-2 RPD.

Tabel 2.9
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten
Tangerang Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,11 - 5,25	5,15	5,20 - 5,33	5,15
2	laju Inflasi	Persen	4,1	4	3,9	4
3	PDRB per kapita	Ribu Rp	52.260,82	52260,82	54.984,60	52260,82
4	Indeks Gini	Indeks	0,26	0,26	0,26	0,26
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,7	0,7	0,6	0,7
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	94,06	94,06	94,26	94,06
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,55	73,55	73,82	73,55
8	Angka melek huruf	Persen	97,85	97,85	97,86	97,85
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,52	9,52	9,82	9,52
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,51	70,51	70,63	70,51
11	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,37	0,37	0,28	0,37
12	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	1,74	1,74	1,54	1,74
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	87,02	87,02	87,32	87,02
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	67,85	67,85	68,25	67,85
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,51	7,51	7,36	7,51
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	24,87	24,87	24,85	24,87
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,45	90,45	91,95	90,45
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	52	52	52,5	52
19	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Penguatan cadangan pangan	Ton	25	25	25	25
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,29	6,29	6,21	6,29
22	Produksi sektor pertanian	Ton	434.447,84	434.447,84	438.765,76	434447,84
23	Pertumbuhan Industri	Persen	4,3	4,3	4,4	4,3
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	1,3	1,3	1,31	1,3
2	Rasio ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	Persen	38,59	38,59	37,54	38,59
III	ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
A	PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	50,6	50,6	52,6	50,6
2	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	105	105	105,1	105,0
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B	Persen	103,76	103,76	103,86	103,8
4	Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SD/MI	Persen	37,57	37,57	40,57	37,6
5	Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SMP/MTs	Persen	14,64	14,64	15,64	14,6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	95,5	95,5	96	95,5
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	77,3	77,3	80	77,3
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	95,5	95,5	96	95,5
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	77,3	77,3	80	77,3
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,12	0,12	0,11	0,1
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,05	0,05	0,04	0,1
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100,0
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100,0
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	92,01	92,01	92,03	92,0
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100,0
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	29,82	29,82	29,92	29,8
17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	27,91	27,91	28,01	27,9
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,034	0,034	0,032	0,0
19	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0,037	0,037	0,034	0,0
20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Nilai	21,36	21,36	22,03	21,4
21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan laki-laki	Persen	99,82	99,82	99,83	99,8
22	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,55	96,55	96,65	96,6
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	100	100	100	100,0
B	KESEHATAN					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	216	216	210	216
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	28	28	26	28
3	Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0,85	0,85	0,86	1
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Nilai	19,37	19,37	19,70	19
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Nilai	0,98	0,98	1,04	1
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Nilai	0,42	0,42	0,43	0
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	71	71	67	71
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100	100	100	100
9	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	98	98	99	98
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
12	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100
13	Angka kejadian Malaria	Kasus				0
14	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	100	100
15	Cakupan puskesmas	Persen	32,85	32,85	35,47	33
16	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	18,13	18,13	18,79	18
17	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	100	100	100
18	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100	100	100	100
19	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100
20	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	100	100
21	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PEKERJAAN UMUM					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	93,18	93,18	93,77	93,18
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	100	100	100	100,00
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	77,87	77,87	84,94	77,87
4	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	24,00	24,00	20,00	24,00
	PENATAAN RUANG					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	21,10	21,10	22,45	21,10
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	21,10	21,10	22,45	21,10
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	99,45	99,45	99,50	99,45
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Rasio rumah layak huni	Persen	95,42	95,42	95,89	95,42
E	SOSIAL					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	98	98	99	98
IV	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
A	TENAGA KERJA					
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	69,34	69,34	70,27	69,34
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	100	100,00
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	64	64	66,2	64
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	14	18	14,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	23,52	23,52	23,75	23,52
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	41,96	41,96	42,64	41,96
5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,59	99,59	99,83	99,59

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	99,58	99,58	99,82	99,58
7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	99,31	99,31	99,86	99,31
8	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	100	100	100	100,00
C	PANGAN					
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	405.917	405.917	409.957,79	405917,00
2	Ketersediaan energi kkal/perkapita/hari	Kalori	2.4	2.4	2.4	2.4
3	Ketersediaan protein gr/perkapita/hari	gram	63	63	63	63,00
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100,00
D	PERTANAHAN					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	22	22	24	22
2	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100
E	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	60	60	62	60
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	96,89	96,89	98,78	96,89
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,36	1,36	1,31	1,36
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,08	2,08	2,07	2,08
3	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	63,46	63,46	67,24	63,46
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	85	85	92	85,00
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.4	1.4	1.2	1.4
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	71.25	71.25	71.5	71.25
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15– 19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Tahun	16	16	16	16,00
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,34	6,34	6,34	6,34
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10.1	10.1	10.1	10.1
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)	Persen	24,69	24,69	24,93	24,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	18,57	18,57	19,49	18,57
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	92	92	94	92,00
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	85.5	85.5	86	85.5
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	97.1	97.1	98	97.1
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	77.5	77.5	93.75	77.5
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	94	94	94.5	94,00
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100,00
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	98.7	98.7	98.72	98.7
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	46	46	50	46,00
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	186,71	186,71	196,04	186,71
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	177,27	177,27	186,13	177,27
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		64,86	64,86	67,57	64,86
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	98.78	98.78	99	98.78
24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	56.75	56.75	57	56.75
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata- Rata	21.6	21.6	21.8	21.6
26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	7.5	7.5	8	7.5
I	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Persentase koperasi aktif	Persen	96	96	96,5	96,0
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	94,2	94,2	94,4	94,2
J	PENANAMAN MODAL					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	9.238	9.238	11.775	9.238
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	19.287,61	19.287,61	20.275,14	19.287,61

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	55,3	55,3	55,3	55,3
K	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	87,72	87,72	96,49	87,72
2	Persentase wirausaha muda	Persen	92,1	92,1	96,5	92,10
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	100	100	100,00
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	20	20	23	20,00
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	128	128	144	128,00
L	PERPUSTAKAAN					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	53.1	53.1	53.200,0	53.1
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	113.2	113.2	113.4	113.2
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	59	59	60	59,0
M	KEARSIPAN					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	68	68	69	68
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1
V	LAYANAN URUSAN PILIHAN					
A	PARIWISATA					
1	Kunjungan wisata	Kunjungan	27.017.377	27.017.377	29.719.114	27.017.377
B	KEBUDAYAAN					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	14	14	16	14
C	PERTANIAN					
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,29	6,29	6,21	6
D	PERDAGANGAN					
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rupiah	27.017.377	27.017.377	29.719.114	27.017.377
E	PERINDUSTRIAN					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	25	25	30	25
F	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Produksi perikanan	Ton	42.836,62	42.836,62	43.158,37	42.836,62
2	Konsumsi ikan	Persen	100	100	100	100,00
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	20,83	20,83	20,83	20,83
4	Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	11	11	11	11,00
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	99,15	99,15	99,15	99,15
6	Nilai tukar nelayan	Persen	106,45	106,45	106,45	106,45
VII	PENUNJANG PEMERINTAHAN					
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d Triwulan I*
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	Persen	100	Ada	100	Ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	Persen	100	Ada	100	Ada
B	KEUANGAN					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen				0
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen				0
4	Belanja pendidikan (20%)	Juta Rupiah	730.947,82	730.947,82	769.866,42	730947,82
5	Belanja kesehatan (10%)	Juta Rupiah	365.473,91	365.473,91	384.933,21	365473,91
6	Perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal	Rasio	3,15	3,15	3,1	3,15
7	Belanja Operasi	Persen	0.67	0.67	0.63	0.67
8	Belanja Modal	Persen	0.31	0.31	0.33	0.31
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0.15	0.15	0.15	0.15
10	Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
C	PENGAWASAN					
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	85	85	86	85
D	SEKRETARIAT DEWAN					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPDP)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Keterangan : *capaian tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja daerah (IKD) Triwulan 1 tahun 2025 yang belum tersedia adalah :

1. Indikator kinerja daerah (IKD) merupakan indikator outcome/hasil dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai produsen data.

2. Indikator sebagian besar dirilis oleh lembaga/instansi diluar Pemerintah Kabupaten Tangerang, seperti BPS.
3. Data yang terisi merupakan data capaian tahun sebelumnya yang sifat data tersebut ada komulatif, semisal laju pertumbuhan PDRB.
4. Ketersediaan data indikator kinerja daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah pada triwulan 4 tahun 2025.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja daerah (IKD) semester 1 tahun 2025 yang belum tersedia adalah :

1. Pengukuran terhadap indikator kinerja daerah (IKD) dilakukan per triwulan untuk mengendalikan target per triwulan dari IKD tersebut bisa tercapai.
2. Mereduksi sebagian data yang dirilis oleh BPS diganti dengan data yang bisa di produksi sendiri oleh perangkat daerah.
3. Memanfaatkan data IKD tahun sebelumnya yang sifatnya komulatif selama belum dirilis oleh BPS sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan data.
4. Mendorong perangkat daerah menentukan target per triwulan, untuk mengukur perkembangan capaian dari IKD.

Tabel 2.10
Target dan Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2025

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
1	2	3	4	5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PRATAMA	74.07%
SPM PENDIDIKAN				
Pendidikan Dasar Usia Dini				68.74%
		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun)*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	70	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				56.27%
		Jumlah Total	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	86716	60996	70.34%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				12.47%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				62.35%
1 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	49	17	34.69%
2 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	60	54	90.00%
Pendidikan Dasar		60	54	97.62%
		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	98	

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	98	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				77.90%
		Jumlah Total	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	516997	503452	97.38%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				19.72%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				98.59%
SD (2025)				98.76%
1 . Kemampuan literasi	Nilai	59	65	100.00%
2 . Kemampuan numerasi	Nilai	54	64	100.00%
3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74	73	98.65%
4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69	68	98.55%
5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59	57	96.61%
SMP (2025)				98.42%
1 . Kemampuan literasi	Nilai	68	67	98.53%
2 . Kemampuan numerasi	Nilai	62	65	100.00%
3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68	67	98.53%
4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68	67	98.53%
5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57	55	96.49%
Pendidikan Kesetaraan		57	55	55.83%
		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	50	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				45.83%
		Jumlah Total	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang			57.29%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				10.00%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				50.00%
1 . Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase			50.00%
SPM KESEHATAN				
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100	50	31.19%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	49,256.80
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	61571	15392	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				11.19%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				55.94%
1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	42356	10600	25.03 %
2 . Tablet tambah darah	Tablet	110082780	2770560	25.00 %
(180 tablet x jumlah ibu hamil)				
3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	61571	15392	25.00 %
4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	1232	309	25.08 %
5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	1232	309	25.08 %
6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	93	23	24.73 %
(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)				
7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	1232	309	25.08 %
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	12315	3078	24.99 %
9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12315	3078	24.99 %
10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	100.00 %
11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol			100.00 %
(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)				
12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	182	182	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)				
13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	334	334	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)				
14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	884	884	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	139	139	100.00 %
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	76	76	100.00 %
17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	58772	15267	25.98 %
(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)				
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		58772	15267	36.67%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	58772	14693	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				16.67%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				83.33%
1 . Formulir partograf	Formulir	26100	26100	100.00 %
2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	12315	3078	24.99 %
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12315	3078	24.99 %
(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	100.00 %
5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	170	170	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	861	861	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	327	327	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	135	135	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	83	83	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		83	83	36.60%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	55500	13875	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				16.60%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				83.01%
1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	50902	6200	12.18 %
2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	55500	13875	25.00 %
3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	55500	13875	25.00 %
(sesuai standar 12-59 bulan)				
4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	25000	25000	100.00 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	25000	25000	100.00 %
(sesuai standar 12-59 bulan)				
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12000	12000	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)				
7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	100.00 %
(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	176	176	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	886	886	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	333	333	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	137	137	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	61	61	100.00 %
13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	91	91	100.00 %
14 . Kader Kesehatan	Orang	11186	11186	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Balita		11186	11186	31.84%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	284085	71021	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				11.84%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				59.19%
1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	56817	14205	25.00 %
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	56817	14205	25.00 %
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12315	3078	24.99 %
4 . Vitamin A Biru	Kapsul	14000	11690	83.50 %
(sesuai standar 6-11 bulan)				
5 . Vitamin A Merah	Kapsul	180000	155028	86.13 %
(sesuai standar 12-59 bulan)				
6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	50902	12740	25.03 %
7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	201754	50500	25.03 %
8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	100568	22500	22.37 %
9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	150852	41950	27.81 %
10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	50284	12570	25.00 %
11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	51030	10490	20.56 %
12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	51030	12590	24.67 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	150852	41950	27.81 %
14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	44	44	100.00 %
15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	44	44	100.00 %
16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	134	134	100.00 %
17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	873	873	100.00 %
18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	332	332	100.00 %
19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	81	81	100.00 %
20 . Guru PAUD	Orang	2594	2594	100.00 %
21 . Kader kesehatan	Orang	11431	11431	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		11431	11431	33.94%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	556948	139237	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				13.94%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				69.70%
1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Form/Buku	111389	27847	25.00 %
(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)				
2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	111389	27847	25.00 %
(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)				
3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	111389	27847	25.00 %
(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)				
4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	22277	2228	10.00 %
(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)				
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	22277	2228	10.00 %
(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)				
6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	7389616	5020964	67.95 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
(Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)				
7 . Alat pemeriksaan Hb	Alat	44	44	100.00 %
(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	20434	18722	91.62 %
(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
9 . Media promosi kesehatan	Paket	44	44	100.00 %
(Media khusus remaja sehat)				
10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	217097	0	0.00 %
(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)				
11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	212	212	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	862	862	100.00 %
13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	319	319	100.00 %
14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	100.00 %
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	126	126	100.00 %
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	58	58	100.00 %
17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			100.00 %
18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	10549	10549	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		10549	10549	37.90%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.23%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2220124	561511	25.29%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				17.67%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				88.33%
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	220	220	100.00 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	44	44	100.00 %
3 . Alat : Tensimeter	Unit	44	44	100.00 %
4 . Alat : Glukometer	Unit	44	44	100.00 %
5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	44	44	100.00 %
6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	2246044	561511	25.00 %
7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	44	22	50.00 %
8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	44	44	100.00 %
9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	44	44	100.00 %
10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	44	44	100.00 %
11 . Alat Pelayanan KB	Unit			100.00 %
a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			100.00 %
b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit			100.00 %
c. Vasektomi set	Unit			0.00 %
12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	44	44	100.00 %
13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	55104	1800	3.27 %
14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	163	163	100.00 %
15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	809	809	100.00 %
16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	313	313	100.00 %
17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	75	75	100.00 %
18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	43	43	100.00 %
19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1694	1694	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		1694	1694	38.85 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00 %
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	229410	57352	25.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18.85 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				94.23 %
1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	44	44	100.00 %
2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	44	44	100.00 %
3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	44	44	100.00 %
4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	9176	2294	25.00 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	135000	135000	100.00 %
6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	6018	6018	100.00 %
7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	100.00 %
8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	143	143	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	874	874	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	325	325	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	154	154	100.00 %
13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3228	3228	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		3228	3228	38.75%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	729628	182407	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18.75%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				93.75%
1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	57	57	100.00 %
(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)				
2 . Obat Hipertensi	Paket	729628	182407	25.00 %
3 . Tensimeter	Unit	1063	1063	100.00 %
(mengukur tekanan darah)				
4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	44	44	100.00 %
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	100.00 %
(peningkatan pengetahuan masyarakat)				
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	161	161	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	809	809	100.00 %
8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	313	313	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	51	51	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	124	124	100.00 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		31	31	37.50%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	43632	10908	25.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				17.50%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				87.50%
1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	35471880	8867970	25.00 %
(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)				
2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	44	44	100.00 %
3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	43632	10908	25.00 %
4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	44	44	100.00 %
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	44	44	100.00 %
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	161	161	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	809	809	100.00 %
8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	313	313	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	120	120	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	47	47	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	76	76	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	76	76	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		76	76	38.40%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				20.06%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4219	1058	25.08%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18.34%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				91.68%
1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	88	88	100.00 %
(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)				
2 . Penyediaan Psikofarmaka	Paket	4219	1058	25.08 %
(pengobatan/medikasi)				
3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	44	44	100.00 %
(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)				
4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	44	44	100.00 %
(pencatatan dan pelaporan)				
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	44	44	100.00 %
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	77	77	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	11	11	100.00 %
(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)				
8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	29	29	100.00 %
9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	3	3	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3	3	30.68%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				16.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48578	9716	20.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				14.68%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				73.40%
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	73	73	100.00 %
2 . Reagen Zn TB	Kit	607	121	19.93 %
3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	972	194	19.96 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	97156	19432	20.00 %
5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	38862	7780	20.02 %
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	73	73	100.00 %
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	73	73	100.00 %
8 . Tuberkulin	Vial	485	102	21.03 %
9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	73	73	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	73	73	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	73	73	100.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	100.00 %
13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	73	73	100.00 %
14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	29	29	100.00 %
15 . Kader Kesehatan	Orang	44	44	100.00 %
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				30.99%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				15.80%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	79559	15715	19.75%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				15.19%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				75.93%
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	44	44	100.00 %
2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	79556	15715	19.75 %
3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	79556	15715	19.75 %
4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	79556	15715	19.75 %
5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	73	73	100.00 %
6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	73	73	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	73	73	100.00 %

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	73	73	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	100.00 %
10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	44	44	100.00 %
SPM PEKERJAAN UMUM				
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			BELUM TUNTAS	32.60%
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		44	44	0.00%
		Rekap Target	Rekap Capaian	
		(Harus Dilayani)	(Terlayani)	
PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	7940	0	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				0.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7940	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				0.00%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				0.00%
JARINGAN PERPIPAAN				
Kuantitas SPAM				
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	635	0	0.00%
Kualitas SPAM				
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	635	0	0.00%
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
Kuantitas SPAM				
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1350	0	0.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
Kualitas SPAM				
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	1350	0	0.00%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		1350	0	65.20%
		Rekap Target	Rekap Capaian	
		(Harus Dilayani)	(Terlayani)	
PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	5508	0	
*tidak masuk dalam hitungan				
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				49.07%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9508	5832	61.34%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				16.13%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				80.67%
KUANTITAS SPALD				61.34%
Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	2377	1458	61.34%
KUALITAS SPALD				100.00%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0.00%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)*Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua				
1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1000	1458	100.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1377	0	0.00%
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			BELUM TUNTAS	3.57%
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		1377	0	0.00%
Bencana Meliputi :				
a) Letusan gunung berapi;				
b) Gempa bumi;				
c) Tanah longsor;				
d) Gelombang pasang;				
e) Banjir bandang; dan/atau				
f) Bencana lainnya.				
Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber PusatDownload SK yang telah di uploadTidak Masuk Kedalam Perhitungan				UPLOAD DOKUMEN
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				0.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				0.00%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				0.00%
1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10	0	0.00%
2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0.00%
3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0.00%
4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0.00%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.14%
Relokasi Program Pemerintah Meliputi :				
a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;				

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;				
c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;				
d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau				
e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)				
<u>Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat(contoh : dokumen RP3KP, dsb.)Tidak Masuk Kedalam Perhitungan3603-20250424085411SURAT REKOMENDASI PERKIM-1.pdf</u>				
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				7.14%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				7.14%
1 . Format Tahapan			Nilai Maksimum Pada TW 1 (25%)	7.14%
1.PENDATAAN				85.71%
FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100%
FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				100%
FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				0%
FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH				100%
FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA				100%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)				100%
FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				100%
2.PERHITUNGAN				0.00%
FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA				0%
FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :				0%
FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :				0%
FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				0%
3.PERENCANAAN				0.00%
FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :				0%
FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :				0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				44.10%
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota				44.10%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				24.46%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	107	30.57%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				19.65%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				98.23%
1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	1710	1710	100.00%
(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)				
2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	19	19	100.00%
(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)				
<u>Data Dukung : 3603-20250403100508SOP Satpol.pdf Status : Approved</u>				
Catatan : Maximal 10 Mb				
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.				
3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	500	447	89.40%
4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	100.00%
<u>Data Dukung : 3603-20250325103431perencanaan.pdf Status : Approved</u>				
Catatan : Maximal 10 Mb				
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.				
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	100.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN				11.73%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana		0	0	6.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				0.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	163283	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				6.00%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				30.00%
1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana				33.33%
a. Tersedianya Dokumen legalitas penetapan KRB (perkada)	dokumen			100.00%
b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan (lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta)	dokumen			100.00%
c. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			0.00%
d. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen			0.00%
e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				26.67%
1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				0.00%
a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar			0.00%
b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			0.00%
c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				80.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			100.00%
b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0.00%
c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			100.00%
d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			100.00%
e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			100.00%
3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik*<i>Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu</i>				0.00%
a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0.00%
b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0.00%
c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		163283	0	3.75%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				0.00%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	111000	0	0.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				3.75%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				18.75%
1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				33.33%
a. Tersedianya Dokumen legalitas RPB (perkada)	dokumen			100.00%
b. Tersedianya Dokumen RPB (lampiran perkada)	dokumen			100.00%
c. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			0.00%
d. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			0.00%
e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
2 . Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)				0.00%
a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			0.00%
c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi				0.00%
1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				0.00%
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0.00%
d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				0.00%
a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0.00%
d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				0.00%
a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
c. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
e. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
f. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
g. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				79.14%
1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				66.58%
a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			32.88%
b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			0.00%
c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			100.00%
d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			100.00%
e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			100.00%
2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				50.00%
a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0.00%
b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			100.00%
c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0.00%
d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			100.00%
3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%
a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			100.00%
b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			100.00%
4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat*Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu				100.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			100.00%
b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			100.00%
6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				0.00%
a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0.00%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		111000	1	25.43%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				16.27%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	61	20.33%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				9.17%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				45.83%
1 . Respon Cepat Darurat Bencana				0.00%
a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			0.00%
b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			0.00%
c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			0.00%
2 . Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				100.00%
a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0.00%
b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
3 . Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana				37.50%
a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			100.00%
b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0.00%
c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0.00%
d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			0.00%
f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0.00%
g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			100.00%
h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR		300	61	16.41%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				16.41%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				10.13%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2400	304	12.67%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				6.27%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				31.36%
1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	300	76	25.33%
2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	4	4	100.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
Data Dukung : 3603-20250425085810SOP Kebakaran.pdf Status : Approved				
Catatan : Maximal 10 Mb				
Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.				
3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	741	0	0.00%
4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	235	0	0.00%
5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	8	3	37.50%
6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	300	76	25.33%
SPM SOSIAL				
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			BELUM TUNTAS	23.57%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			300	13.09%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				9.85%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	203	25	12.32%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				3.23%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				16.17%
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	203	25	12.32%
layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	203	25	12.32%
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar				
3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	0	0.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)				
4 . Penyediaan sandang	Orang	50	0	0.00%
(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5 . Penyediaan alat bantu	Orang	68	0	0.00%
(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)				
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10	0	0.00%
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	0	0.00%
(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	25	0	0.00%
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	5	25.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)				
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	40	26	65.00%
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)				
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	2	40.00%
(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)				
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	2	40.00%
(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				
13 . Layanan rujukan	Orang	32	5	15.63%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		32	5	70.95%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				64.52%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	310	250	80.65%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				6.44%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				32.19%
1 . Layanan data dan pengaduan	orang	310	250	80.65%
layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	310	250	80.65%
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar				

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
3 . Penyediaan permakanan	Orang	310	250	100.00%
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar				
4 . Penyediaan sandang	Orang			100.00%
(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		310	250	
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	25	0	0.00%
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10	0	0.00%
(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	35	0	0.00%
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	5	25.00%
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3	0	0.00%
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)				
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	0	0.00%
(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)				

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	0	0.00%
(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				
12 . Layanan rujukan	Orang	3	0	0.00%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		3	0	10.34%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				7.44%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	335	33	9.30%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				2.90%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				14.51%
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	335	33	9.30%
layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	335	33	9.30%
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar				
3 . Penyediaan permakanan	Orang	125	0	0.00%
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)				
4 . Penyediaan sandang	Orang	125	0	0.00%

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5 . Penyediaan alat bantu	Orang	60	0	0.00%
(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan)				
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	0	0.00%
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	5	0	0.00%
(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	30	0	0.00%
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	1	5.00%
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	1	25.00%
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)				
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	5	50.00%
(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)				
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	5	50.00%
(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
13 . Layanan rujukan	Orang	5	2	40.00%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		5	2	9.90%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				9.14%
		Jumlah	Jumlah	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	245	28	11.43%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				0.75%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				3.76%
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	245	28	11.43%
layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	115	3	2.61%
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis				
3 . Penyediaan permakanaan	Orang	50	0	0.00%
(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)				
4 . Penyediaan sandang	Orang	50	0	0.00%
(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	0	0.00%
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	140	0	0.00%
(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial				
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	10	0	0.00%
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	0	0.00%
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	100	0	0.00%
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)				
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	180	28	15.56%
(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)				
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			15.56%
(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)		180	28	
12 . Layanan rujukan	Orang	2	0	0.00%
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2	0	13.55%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				11.05%
		Jumlah	Jumlah	

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian	Total Pencapaian
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3300	456	13.82%
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				2.50%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				12.49%
1 . Penyediaan permakanan	Orang	3300	456	13.82%
(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)				
2 . Penyediaan sandang	Orang	650	166	25.54%
(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	6	0	0.00%
(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)				
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	65	15	23.08%
(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)				
5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	65	0	0.00%

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/3603/1/2024

Pencapaian SPM triwulan 1 tahun 2025 menggunakan data capaian sampai tahun 2024 untuk SPM (Standar Pelayanan Minimal) bersumber dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, dari SPM yang ada yang belum terrealisasi adalah SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas yaitu Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa Sarana prasarana penanggulangan bencana dengan target 151 persen, dan Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) dengan target 590 persen yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.11
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	85.38	92.114954	100%
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	99.11	108.90136	100%
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	92.87	95.604786	100%
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	70.38	88.322296	100%
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah Penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	1.02	0.8668367	0.1%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi. Jumlah RS di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100%	0	0	10%
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) dikali 100%	0	0	6%
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	5.63	6.4153543	7,64%
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. dikali 100%	53.05	61.250814	54%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten A dikali 100%	98.01	96.890798	98,6%
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku dikali 100%	99.89	99.252137	96%
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota dikali 100%	94.19	95.18542	93,77%
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	100	100	100%
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100%	100	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100%	100.000	100	100%
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan dikali 100%	100.000	100	100%
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikali 100%	2.781	3.0558097	9,88%
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kabupaten/kota dikali 100%	3.103	2.8871808	3,66%
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi. Jumlah unit rumah kab/kota dikali 100%	29.310	38.436045	27,66%
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	100	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
		Perlindungan Masyarakat					
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100	100	100%
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%	100	100	100%
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%	55.41	73.969868	100%
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikali 100%	100	100	100%
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di	100	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
				kabupaten/kota dalam tingk dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota dikali 100%			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah / Jumlah kasus kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X	14.34	14.67	
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	100	100	13%
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	94.60	100	100%
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan	100.00	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
				perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%			
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota dikali 100%	100.00	100	100%
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100%	0.17	60	6%
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja dikali 100	23.89	0.1367787	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi. Jumlah Perusahaan dikali 100%	56.15	21.899612	42%
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar dikali 100%	62.67	48.085443	74%
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD dikali 100%	73.82	77.949733	51,82%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%	100.00	100	100%
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi. Jumlah penduduk perempuan	5.86	4.0696424	9,26
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dibagi Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dikali 100%	9.8	95.68004	9,05%
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dikali 100%	100.0	100	100%
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	96.6	97.617351	100%
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan	100.0	4.8926551	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
				Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dikali 100%			
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform dikali 100%	0.0	0	0
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah dibagi Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan dikali 100%	0.0	0	0
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100%	100.0	0	0
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Perhitungan IKA, IKU dan IKTL dengan perbandingan 0,376 IKA, 0,405 IKU dan 0,219 IKL	49.8	55.87	56,25%
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota dikali 100%	57.5	63.500023	57,5%
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi usaha	12.0	25	11%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
				dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%			
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	98.98	99.999675	99,47%
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	50.73	58.242353	70%
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi. Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	93.12	91.359312	99,5%
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi. Jumlah PD dikali 100%	55.93	72.881356	85,48%
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100%	100.00	100	100%
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per	72.09	41.860465	10.31%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
				tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100%			
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung	2.10	1.84	2.07
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	67.46	75.570052	71.5%
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlas Pasangan Usia Subur dikali 100%	11.64	4.8528049	10.1%
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0.70	0.4	0.79
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	0.28	0.35	0,8
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah PD dikali 100%	100.00	100	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah Layanan Publik dikali 100%	46.43	100	100%
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk dikali 100%	71.65	100	92.75%
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi aktif dikali 100%	13.47	6.0402685	16%
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi. Jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%	35.87	4.0156693	100%
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota dikali 100%	56.67	-11.50746	5,12%
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100%	0.02	0.0194772	0,3%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100%	1.05	1.1490255	0.74%
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	81.00	37	50%
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah PD dikali 100%	100.00	100	100%
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi . jumlah PD dikali 100%	100.00	100	100%
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian dikali 100%	58.29	93.953488	58.14%
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100%	0.00	0	4%
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	55.58	69.34	79.71

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	49.93	52.7	55.64
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Jumlah total Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi 4	55.00	100	38.8
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah total Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten dengan NSPK + Tingkat kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK dibagi 6	66.00	100	33.3

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota dibagi Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan dikali 100%	101.63	101.45655	100% (43.562 ton)
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	88.89	19.955477	3,57%
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi . Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	45.45	19.939557	3,57%
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100%	96.14	96.608948	7%
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB. dibagi Total PDRB Berlaku	1.49	1.5606476	1,55%
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata dibagi. Total realisasi PAD dikali 100%	14.80	15.298588	14,15%
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi luas panen dikali 100%	493.17	493.72664	4,94%
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%	1.99	-30.78286	1%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan			0	0	0
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dibagi Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi dikali 100%	0	0	0
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota dikali 100%	100	100	100%
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	31.10	47.513268	38%
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi . jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100%
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	28.12	22.509703	4,5%
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah capaian sasaran pembangunan industri di RIPIN yang diterapkan di RPIP	100	146.58	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	1.49	5.0719823	21,66%
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	-	0	2%
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi. Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	100	100	2%
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100%
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi			-	100	-
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi. Jumlah APBD dikali 100%	8.9	8.5910318	8.70%
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD dikali 100%	55.7	54.293216	46,84%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/level 3) berdasarkan laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3.0	3	3
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Karakteristik Level Kapabilitas APIP	3.0	3	3
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures dibagi jumlah belanja APBD dikali 100%	59.0	62.232102	84.1%
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	10	WTP
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n dikali 100%	10.0	0	2%
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%	39.0	35.811543	8,21%
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasi dan modal dikali 100%	54.1	25.708	51%
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro,	24.0	22.454442	70%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
			Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100%			
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah seluruh pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	79.275591	79.275591	80,00%
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	22.771654	22.771654	32,00%
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	79.275591	100	85,00%
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja dibagi Total Belanja APBD dikali 100%	10.9	13.481535	93.7%
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD dikali 100%	29.7	24.00089	120%
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	Apakah ada daftar aset tetap	4	4	Ada

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2023	2024	2025
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ada	Ada	Ada
				Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ada	Ada	Ada
				Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ada	Ada	Ada
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA dibagi total belanja anggaran tahun sebelumnya dikali 100%	15.4	10.021277	2.81%
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dibagi. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dikali 100%	94.64	95.841377	100%
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda dibagi total jumlah dokumen yang telah dirinci dikali 100%	100.00	100	90%

Keterangan : n/a : data belum tersedia

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja kunci (IKK) semester 1 tahun 2024 yang belum tersedia adalah :

1. IKK (indikator kinerja kunci) merupakan capaian outcome yang berhasil jika program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah terlaksana oleh perangkat daerah.
2. IKK merupakan bagian dari pelaporan yang tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang pengumpulan data dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah di triwulan 1 tahun 2025.
3. Belum ada pengendalian untuk mengukur capaian IKK per triwulan.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja kunci (IKK) semester 1 tahun 2024 yang belum tersedia adalah :

1. Pengukuran terhadap indikator kinerja kunci (IKK) dilakukan per triwulan untuk mengendalikan target per triwulan dari IKK tersebut bisa tercapai.
2. Memanfaatkan data IKK tahun sebelumnya yang sifatnya kumulatif selama belum dikumpulkan oleh perangkat daerah sebagai produsen data.
3. Mendorong perangkat daerah menentukan target per triwulan, untuk mengukur perkembangan capaian dari IKK.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan dan menyesuaikan kembali kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia atau dimiliki, mengalokasikan sumber daya secara efektif sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran pada tahun berjalan sampai dengan triwulan I. Beberapa aspek penting dalam penyusunan anggaran diantaranya adalah penyaluran antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembahasan dalam Bab ini menyoroti pentingnya kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025 berdasarkan evaluasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025. Analisis ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan alokasi keuangan daerah secara efektif. Evaluasi proyeksi anggaran berdasarkan kondisi keuangan eksisting akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Tangerang.

Penyesuaian APBD TA. 2025 dilakukan juga sebagai tindak lanjut regulasi teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah, sehingga perlunya dilakukan perubahan struktur anggaran pada RKPD Tahun 2025, diantaranya berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan merupakan bagian penting dari serangkaian prioritas kerja yang menjadi patokan dan landasan untuk perencanaan pelaksanaan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dalam periode waktu tertentu. Selain itu, arah kebijakan juga berfungsi sebagai landasan konseptual atau kerangka kerja untuk mengatasi tantangan pembangunan serta sebagai langkah untuk mengantisipasi isu-isu strategis di daerah atau instansi pemerintah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan strategi dan kebijakan ekonomi yang telah direncanakan dan dialokasikan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi Banten

Tema RKP 2025 :

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tema RKP 2025 diatas diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

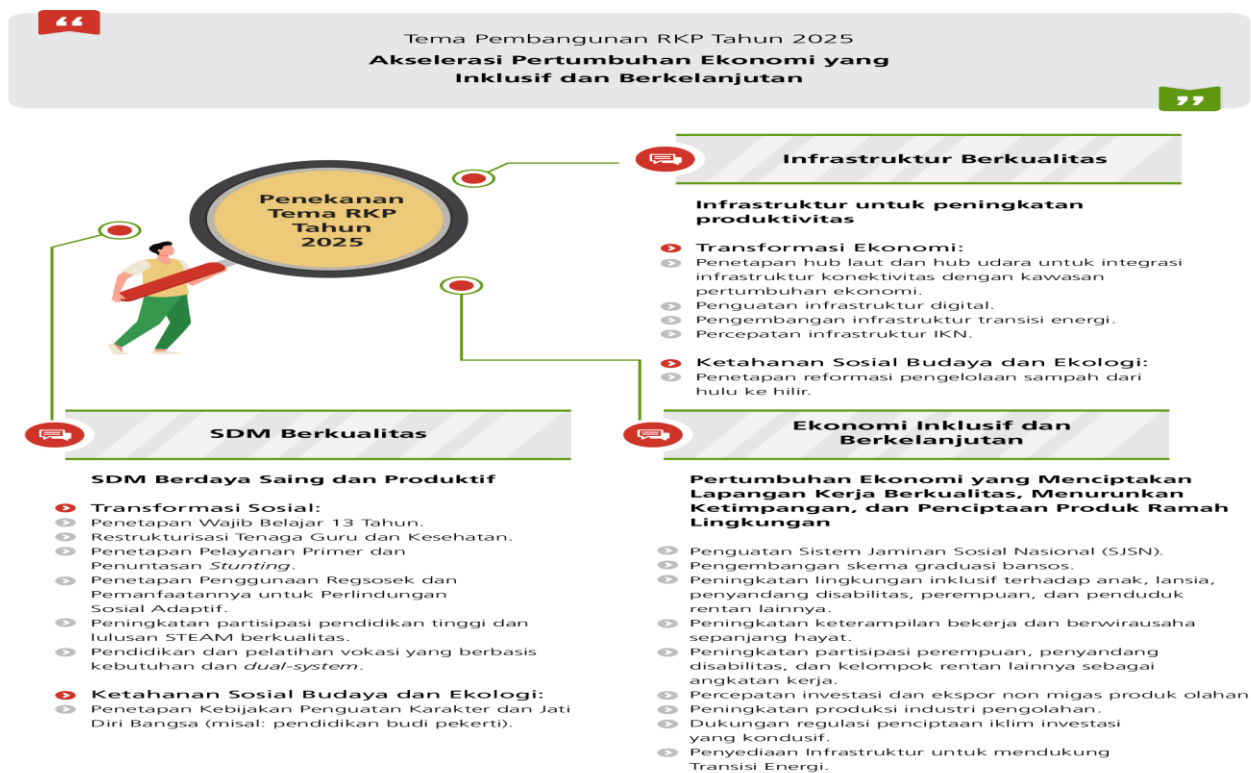
1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;

2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan RKP 2025 di bidang ekonomi adalah Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dengan penekanan alokasi terhadap arah kebijakan tersebut secara rinci adalah :

1. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2. Pengembangan skema graduasi bansos
3. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas , perempuan, dan penduduk rentan lainnya
4. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
5. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas , dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
6. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
7. Peningkatan produksi industri pengolahan
8. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
9. Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Gambar 3.1
Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025



Gambar 3.2
Prioritas Nasional Tahun 2025



Sementara itu tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 adalah “Pembangunan Kolaboratif Yang Inklusif Untuk Memperkokoh Masyarakat Banten Yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing ” Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 di daerah, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2025, ditetapkan prioritas daerah sebagai berikut. Berdasarkan perumusan isu strategis di atas, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025 dalam 4 (empat) Prioritas Daerah, yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia; Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tangerang

Mengacu dan dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta untuk mengakselerasi agenda kepemimpinan daerah hasil pemilihan kepala daerah, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 maka Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

”PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR”.

Arah kebijakan ekonomi Tahun 2025 juga disusun dengan mengakomodir substansi visi, misi, dan program unggulan kepala daerah terpilih yaitu :

1. Visi Kepala Daerah Terpilih:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)”
2. Misi Pembangunan Daerah:

- Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
- Mewujudkan perekonomian yang kuat, produktif, dan berdaya saing
- Mewujudkan kesehatan yang berkualitas
- Mewujudkan pendidikan yang berkualitas
- Mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur
- Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan

3. Program Unggulan

a. PRIMA (Pemerintah, Inovativ, Maju & Smart)

- Pembangunan Sarana Drive Thru Layanan Kependudukan di kecamatan (Digitalisasi kependudukan di kecamatan),
- Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu,
- Penyediaan Mobil Training Unit (MTU),
- Pembangunan Gedung diorama,
- Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda.

b. PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, dan Daerah)

- Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM
- Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan) pada 25 Desa
- Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan di 50 desa
- Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan
- Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park)

c. TUNAS (Talenta Unggul Generasi Sehat)

- Pencegahan dan penanganan Balita Stunting melalui pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;
- Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;
- Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih;
- Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual;
- Penyediaan ambulance dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan

d. SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak)

- Pembangunan Perpustakaan Modern di kecamatan
- Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten
- Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)
- Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan
- Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta

e. SELARAS (Sistem Lingkungan Yang Aman, Ramah & Berkesinambungan)

- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional di Kecamatan Kemeru
- Pengelolaan dan Pengolahan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir
- Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten,
- Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh pemerintah daerah
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan.
- Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, Sekaligus Kawasan Wisata Baru

Program dan Fokus Pembangunan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan
 - Pembangunan dan Pengembangan Inkubator Bisnis
 - Penguatan kelembagaan dan optimalisasi puskesmas menjadi BLUD.
 - Fasilitasi kemudahan berinvestasi
 - Fasilitasi Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - Pelaksanaan Event Pariwisata Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dalam Calendar Event.
 - Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - Pemberdayaan masyarakat Pesisir Kabupaten Tangerang melalui konsep pengembangan ekonomi Masyarakat pesisir /Blue Citizen.
 - Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tangerang
 - Penguatan kelembagaan dan Optimalisasi PUSKAGRO menjadi BLUD
 - Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
2. Peningkatan Kemandirian Desa
 - Optimalisasi BUMDes dalam Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM).
3. Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Peningkatan Ketahanan dan Cadangan Pangan wilayah Kabupaten Tangerang.
4. Peningkatan Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - Peningkatan perlindungan sosial PPKS
 - Penanganan rehabilitasi sosial
 - Peningkatan pemberdayaan sosial bagi PPKS
5. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
 - Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan
 - Peningkatan akses dan kemudahan layanan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui sistem informasi berbasis web
 - Peningkatan perlindungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha
6. Secara rinci arah kebijakan bidang ekonomi dijabarkan sebagai berikut:
 - Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - Pengembangan skema graduasi bansos
 - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas , perempuan, dan penduduk rentan lainnya
 - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas , dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - Peningkatan produksi industri pengolahan
 - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga)

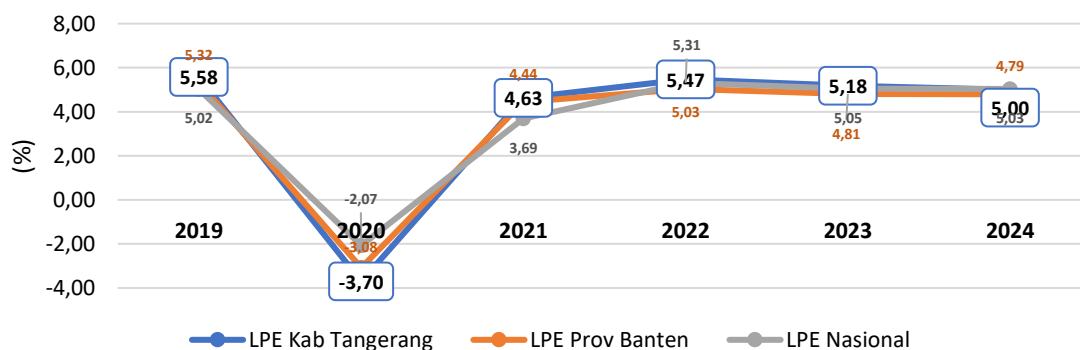
pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian.

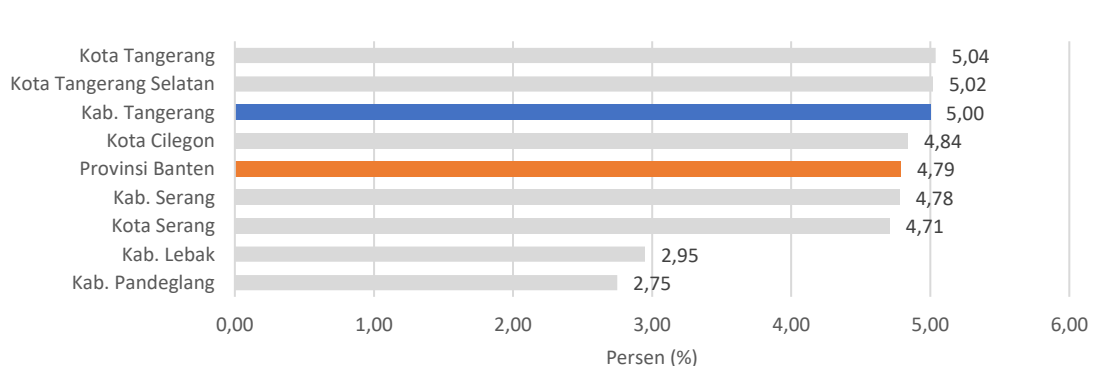
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor.



Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 3.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2019 - 2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,84	-0,84	2,26	1,74	-0,28
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	-5,90	-9,45	-12,35	0,25	4,80
C	Industri Pengolahan	3,20	-8,47	4,26	5,44	7,01	4,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,23	-12,35	11,69	5,59	-0,45	-13,42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1,35	5,69	1,93
F	Konstruksi	9,44	-3,29	11,96	8,25	1,74	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-3,70	1,82	3,27	4,83	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	9,55	-5,32	9,90	7,89	5,84	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	-5,63	4,45	8,33	8,93	9,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6,84	9,34	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6,81	-0,48	0,90
L	Real Estate	9,49	1,96	3,07	5,19	5,20	5,33
M, N	Jasa Perusahaan	9,20	-6,00	-2,25	4,46	8,52	8,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	-0,38	-0,76	1,09	3,17	26,36
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,62	-1,10	-0,09	6,82	7,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2,92	8,94	13,23
R,S,T, U	Jasa Lainnya	9,36	-6,11	1,39	7,77	10,98	4,68
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB Menurut Lapangan Usaha

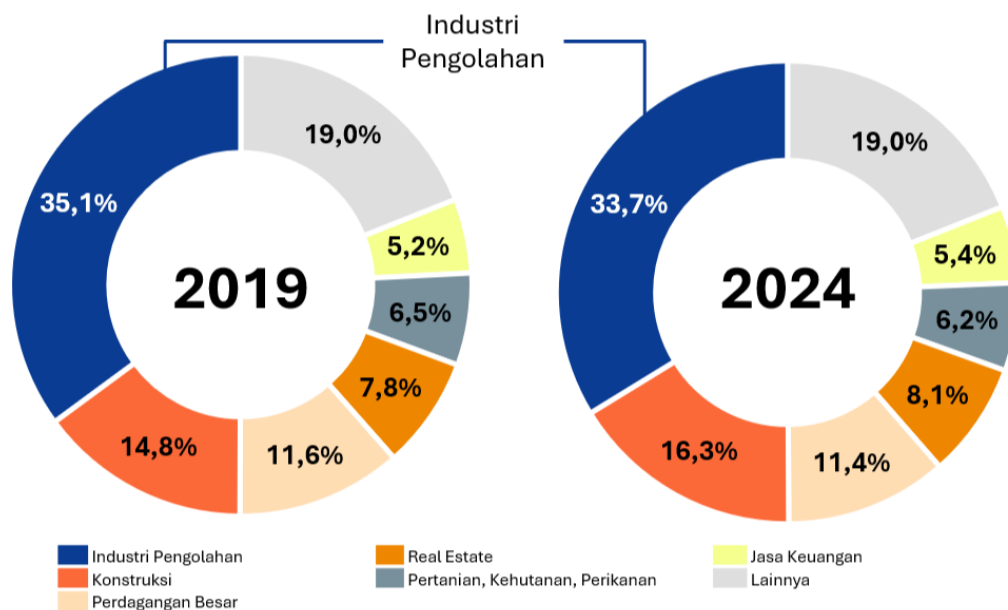
Tabel 3.2

PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
(dalam Miliar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98	10.921,46	11.456,58
B	Pertambangan dan Penggalian	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24	51,19
C	Industri Pengolahan	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12	58.318,29	62.789,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40	4.893,85	4.053,44
E	Pengadaan Air	85,48	93,49	100,24	102,87	110,40	119,98
F	Konstruksi	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03	28.336,15	30.437,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47	19.324,82	21.127,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79	6.083,52	6.711,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57	2.586,71	2.904,43
J	Informasi dan Komunikasi	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03	6.132,02	6.587,77
K	Jasa Keuangan	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07	9.774,50	9.966,91
L	Real Estate	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97	13.853,03	15.035,63

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
M.N	Jasa Perusahaan	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84	1.769,91	1.974,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84	2.941,08	3.813,07
P	Jasa Pendidikan	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36	4.404,83	4.941,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	656,87	695,57	774,48	811,76	917,22	1.063,50
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19	2.886,59	3.068,90
PDRB (dalam miliar rupiah)		140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18	173.301,26	186.104,15

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)



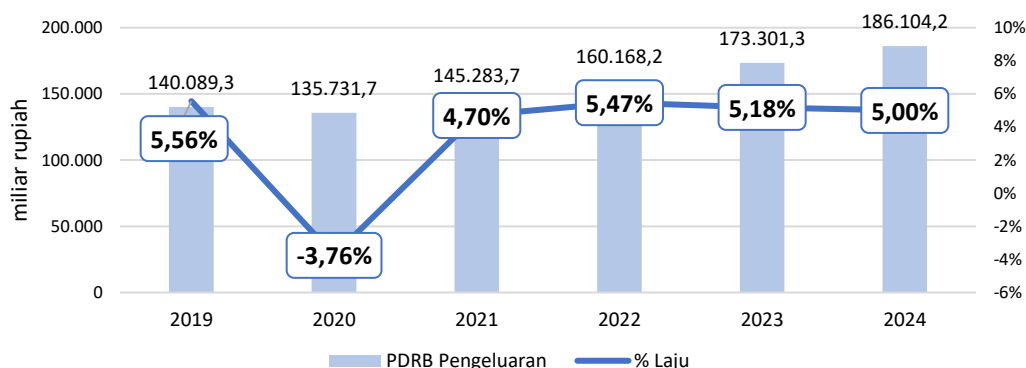
Gambar 3.5

Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan real estate menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

PDRB Menurut Pengeluaran



Gambar 3.6

PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,2 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan utamanya setelah pandemi tahun 2019.

Tabel 3.3

PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	72.998.709,26	71.693.730,68	74.770.602,15	81.562.475,55	88.647.200,83	97.947.130
Konsumsi LNPRT	710.429,81	679.685,90	701.768,54	749.881,39	811.729,66	951.440
Konsumsi Pemerintah	5.031.644,99	4.621.839,02	4.890.012,15	5.219.166,20	6.001.089,65	6.914.430
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.233.021,18	35.450.044,41	37.900.875,49	40.717.192,10	46.853.056,17	50.185.960
Perubahan Inventori	4.346,34	716,21	61,28	300,11	49.843,77	240.860
Net Ekspor	26.111.136,01	23.285.665,67	27.020.356,91	31.919.161,45	30.945.748,91	29.864.320
Ekspor	98.587.772,18	94.833.778,71	105.562.340,92	132.194.567,86	150.386.973,45	
Impor	72.476.636,17	71.548.113,04	78.541.984,01	100.275.406,41	119.441.224,54	
PDRB	140.089.287,58	135.731.681,88	145.283.676,52	160.168.176,80	173.302.663,99	186.104.150

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

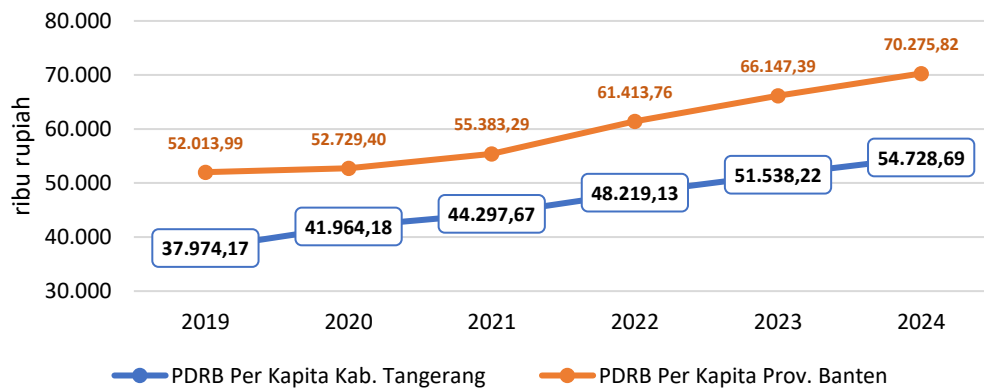
Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Provinsi Banten yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Kabupaten Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau

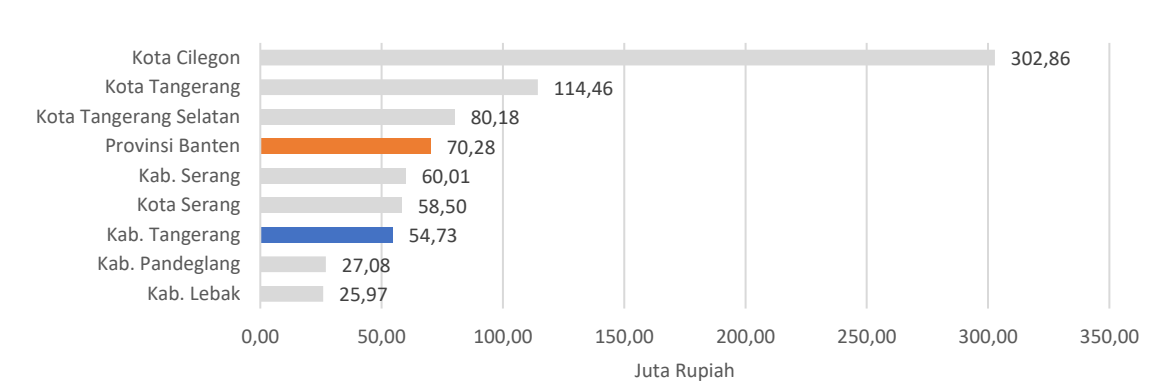
penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang di bawah Provinsi Banten.



Gambar 3.7
PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



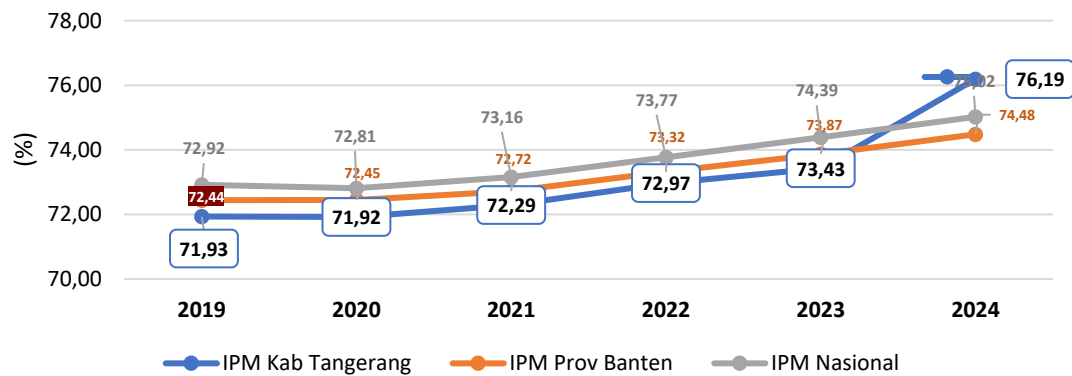
Gambar 3.8
Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 76,19 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat

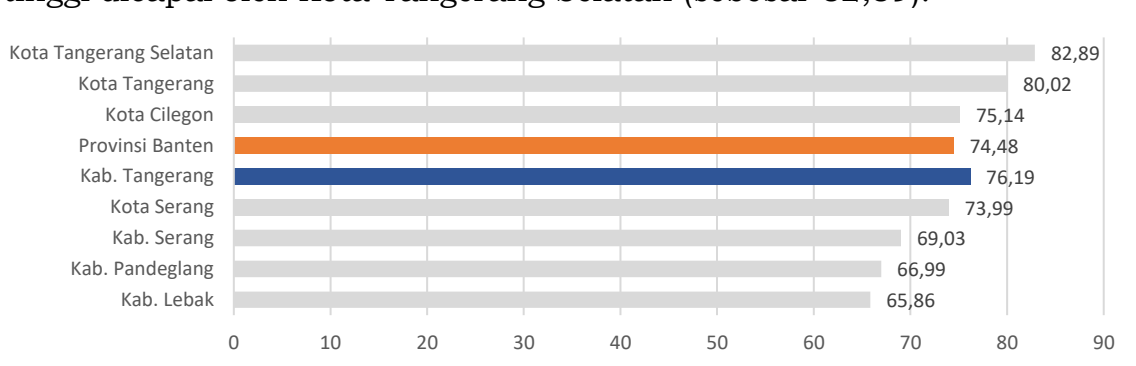
tingkat pengeluaran per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah dan di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Maka dari itu, diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2024

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih menempati posisi kelima IPM terendah. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 82,89).

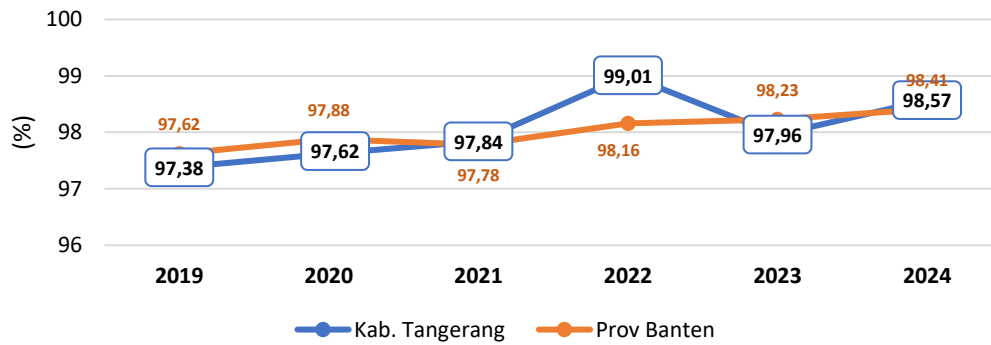


Gambar 3.10
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

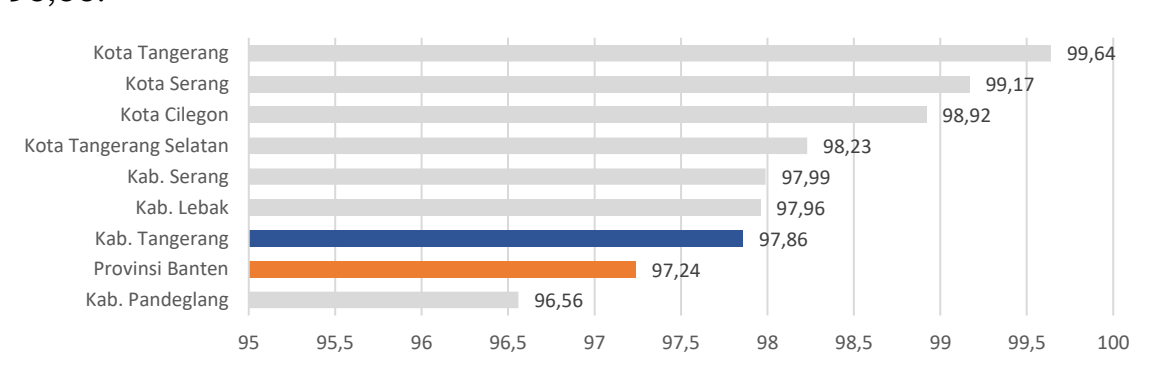
Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 97,96% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis.



Gambar 3.11
 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

Secara umum, angka melek huruf penduduk di atas 15 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan wilayah di sekitarnya. Kabupaten/Kota dengan angka melek huruf paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang dengan angka sebesar 99,64. Sementara Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka melek huruf paling rendah pada tahun 2023 dengan angka sebesar 96,56.



Gambar 3.12
 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 3.4
 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023

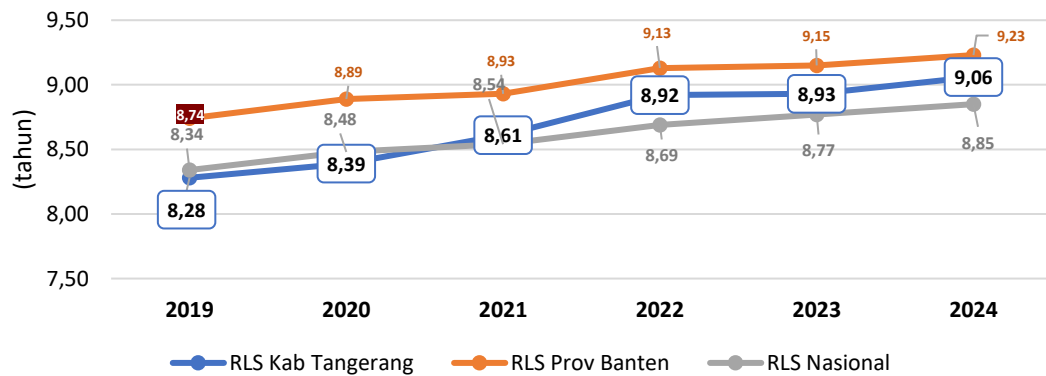
Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	99,98%	100,00%	99,84%	100,00%	99,92%
20-24	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25-29	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30-34	100,00%	100,00%	99,38%	99,67%	100,00%
35-39	99,97%	100,00%	100,00%	99,81%	99,35%
40-44	100,00%	100,00%	99,30%	99,91%	100,00%
45-59	99,06%	96,66%	99,04%	100,00%	100,00%
50+	86,41%	89,22%	91,28%	95,81%	92,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di atas 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Kabupaten Tangerang memiliki lama rerata sekolah 9,06 tahun atau hampir setara dengan waktu menempuh pendidikan setara SMP. Secara umum RLS Kabupaten Tangerang terus meningkat dari waktu ke waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas

capaian pendidikan di wilayah ini. Namun, jika di sandingkan dengan wilayah yang lebih luas, Kabupaten Tangerang memiliki capaian RLS yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan diperlukannya upaya peningkatan dan pemupukan semangat dalam mengenyam pendidikan formal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

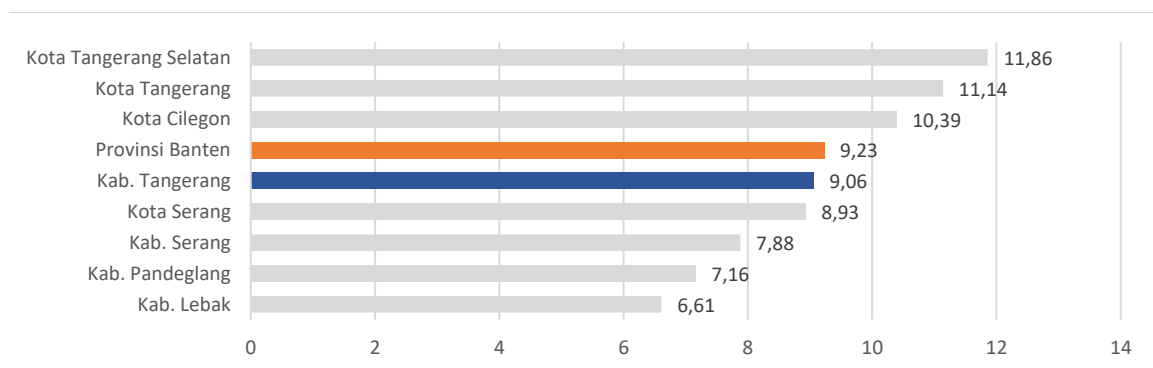


Gambar 3.13

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan masih di bawah capaian Provinsi Banten yang mencapai angka 9,23 tahun. Wilayah di Provinsi Banten dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yang mencapai angka 11,86 tahun. Sementara Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dengan angka 6,61 tahun.



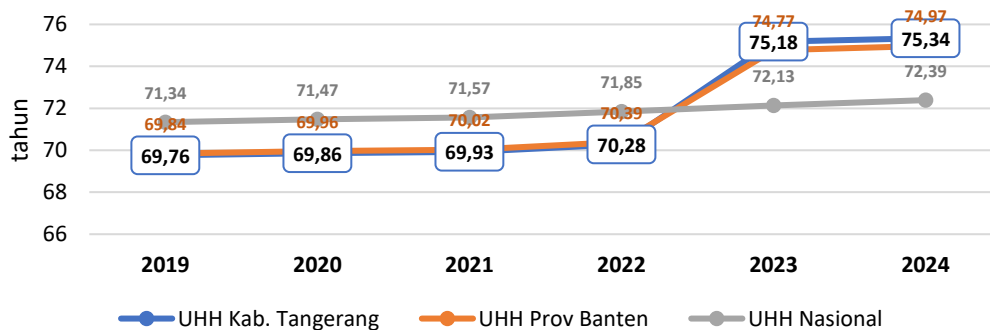
Gambar 3.14

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

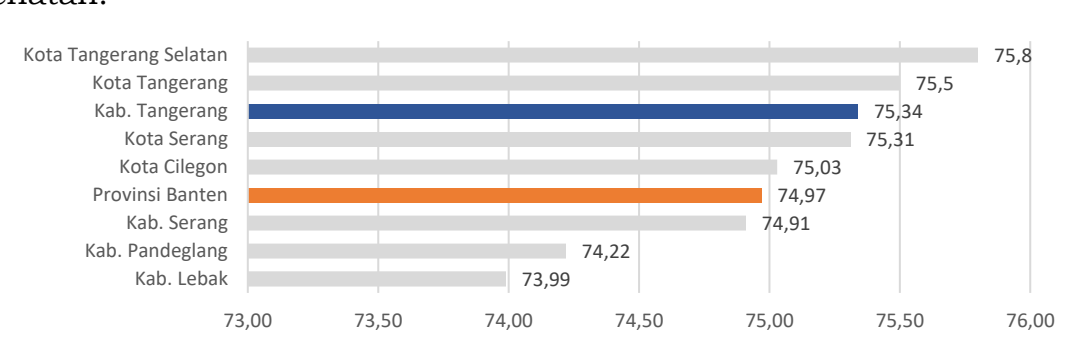


Gambar 3.15

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2024

Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, tetapi sudah berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan.



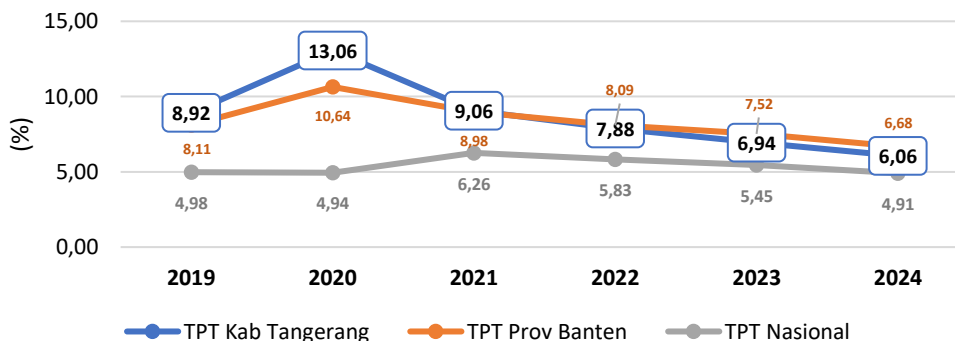
Gambar 3.16

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.

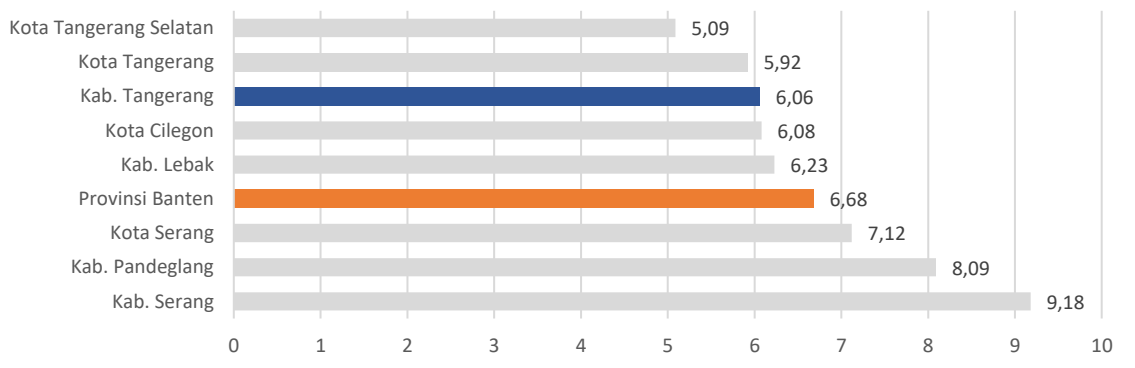


Gambar 3.17

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%.



Gambar 3.18

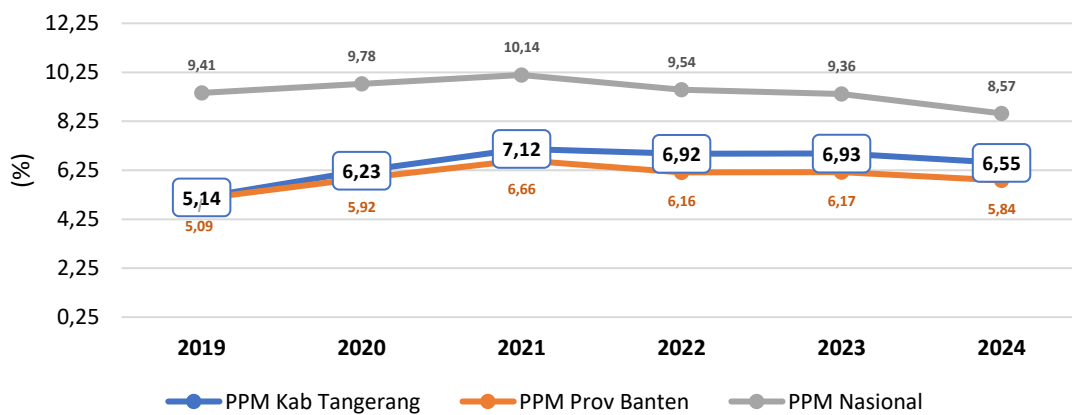
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3.1.5 Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

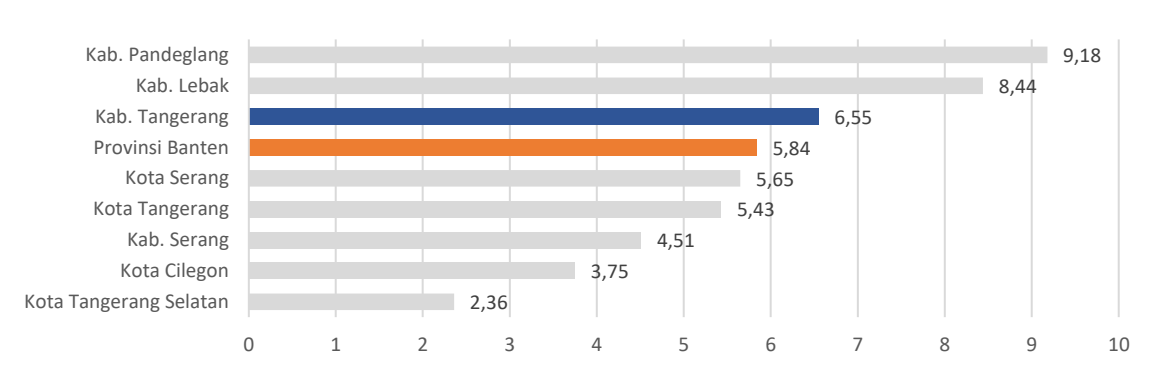


Gambar 3.19

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%.

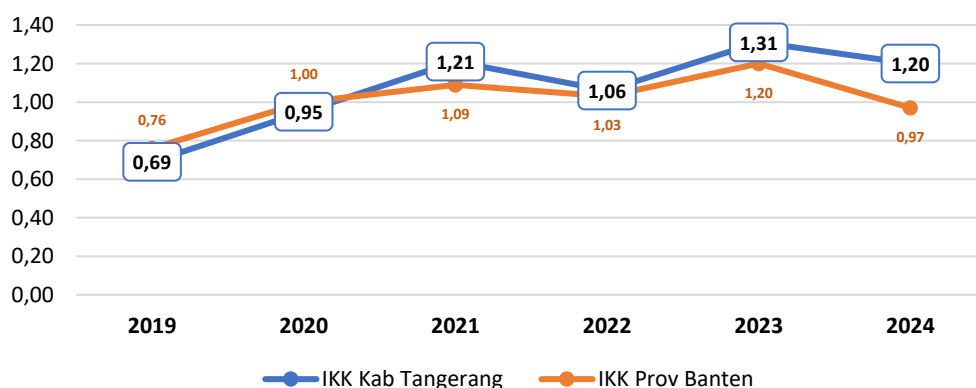


Gambar 3.20
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya *gap* antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang.

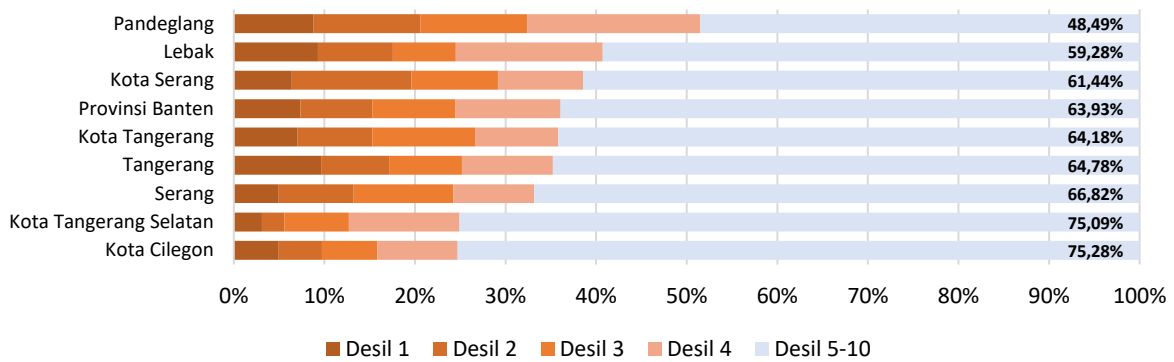


Gambar 3.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan)

Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram dibawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin.

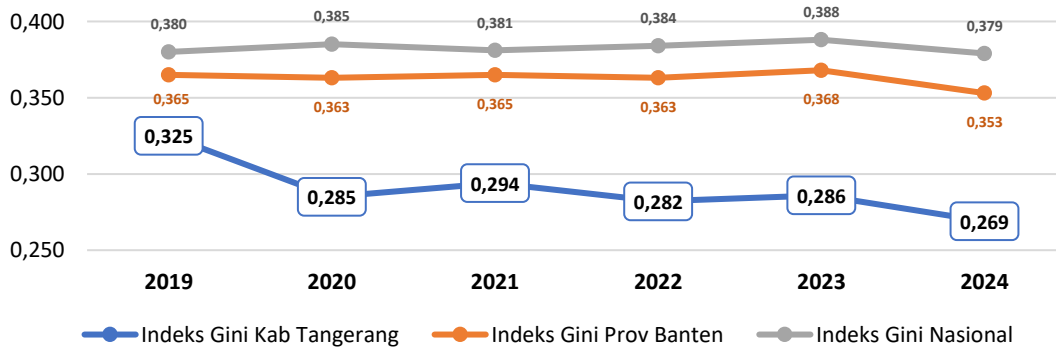


Gambar 3.22
Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>)

Berdasarkan gambar diatas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa.

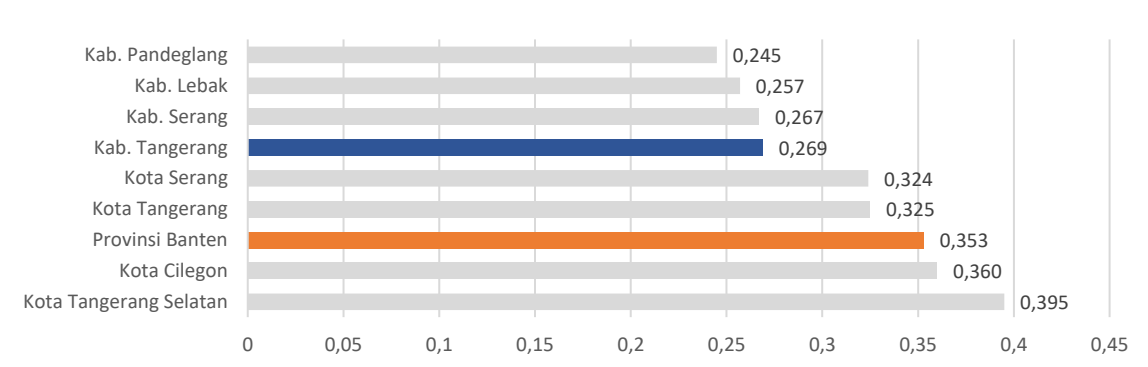
3.1.6 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki *gap* yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional.



Gambar 3.23
Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245.



Gambar 3.24

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

3.1.7 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2025 pada P-RKPD 2025

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diturunkan batas bawah/pesimisnya di angka 5,07-5,20 dimana sebelumnya di angka 5,28-5,33. Hal ini sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan LPE Indonesia tahun 2025 sebesar 5,1% lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang menargetkan rata-rata LPE selama 5 tahun sebesar 7,8%. Perekonomian Kabupaten Tangerang yang didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan ekonomi kreatif, memang diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun gelombang PHK besar-besaran masih terus menghantam industri padat karya di Kabupaten Tangerang, pasca Pandemi Covid-19. Terlebih industri-industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang umumnya berorientasi terhadap ekspor.

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih optimis berdasarkan capaian Tahun 2024 yang cukup positif di angka 6,06. Oleh karena itu TPT diproyeksikan turun dari angka 6,5 ke angka 6,00 ditopang oleh daya serap tenaga kerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM khususnya di Kabupaten Tangerang memiliki peranan penting dalam menurunkan kembali angka kemiskinan, serta memperluas lapangan pekerjaan seperti tahun-tahun sebelum terjadinya Covid-19. Selain Pemberdayaan UMKM, usaha nyata lainnya adalah membuka Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak-banyaknya sebagai solusi penanganan PHK berkelanjutan.

Proyeksi Persentase Penduduk Miskin diturunkan berdasarkan capaian Tahun 2024 yang tidak terlalu menggembirakan di mana persentase penduduk miskin hanya mencapai angka 6,55% sehingga proyeksi disesuaikan menjadi 6,50%. Hal ini dikarenakan tingginya inflasi dalam beberapa tahun terakhir menekan daya beli masyarakat yang berada tipis di atas garis kemiskinan.

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan karena capaian IPM pada Tahun 2024 sudah cukup baik dan melampaui proyeksi sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan berbagai Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan sisi Kesehatan dengan meningkatkan pelayanan Rumah Sakit serta pembangunan rumah sakit baru. Dan sisi Pendidikan, Kabupaten Tangerang juga mendorong sisi Pendidikan dengan meningkatkan sarana prasarana Pendidikan lainnya.

Proyeksi Rasio Gini pada tahun 2025 yang semula di angka 0,275 diturunkan menjadi 0,265. Hal ini dikarenakan capaian pada tahun 2024 telah mencapai 0,269. Rasio Gini Kabupaten Tangerang yang mengikuti Kota Tangerang mengalami penurunan terus di setiap tahunnya.

Tabel 3.5
Capaian Tahun 2024 dan Proyeksi Indikator Makro Tahun 2025
pada P-RKPD 2025

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	RKPD 2025			P-RKPD 2025	
			Realisasi 2024	Target RKPD 2025		2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,28-5,33		5,30-5,65	5,3
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,06	6,50		6,74-6,19	6,00
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,55	6,90		6,34-6,77	5,94- 6,17
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,19	75,77		75,59-76,09	76,62
5	Index Gini	Poin	0,269	0,275		0,283-0,286	0,260

Sumber: BPS dan Analisis Bappeda 2025

Proyeksi kinerja perekonomian Kabupaten Tangerang didasarkan pada beberapa asumsi.

A. Faktor Pendorong:

1. Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19.
2. Mengurangi jumlah pengangguran melalui upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, dan program Mobile Training Unit (MTU).
3. Upaya meningkatkan RLS antara lain penggratisan biaya pendidikan sekolah dasar, dan menengah, pembangunan USB, RKB, dan pemberian BOSDA.
4. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan.
5. Reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Fokus pada menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bantuan sosial yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
7. Ekspansi fiskal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
8. Komitmen kolaboratif lintas sektor
9. Pertumbuhan positif industri pengolahan,
10. Pertumbuhan positif perdagangan,
11. Optimisme masyarakat.
12. Kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Tangerang cenderung tinggi meski mengalami tren penurunan
13. Kontribusi PDRB yang tinggi dari Sektor industri

Faktor Penahan:

1. Pengendalian inflasi yang belum maksimal
2. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri
3. Ketidakpastian global, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik, yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan berdampak pada daerah.
4. Dampak Kenaikan inflasi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, dapat memengaruhi kinerja ekonomi di Indonesia.
5. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat di Kabupaten Tangerang, khususnya dari kebutuhan non-leisure (misalnya barang kebutuhan sehari-hari) ke kebutuhan leisure (misalnya rekreasi, hiburan, dan kegiatan waktu luang), menunjukkan tren konsumsi yang semakin fokus pada pengalaman dan gaya hidup.
6. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain Upah Minimum Regional yang lebih rendah
7. Ketergantungan terhadap sektor industri tertentu
8. Rendahnya daya saing tenaga kerja Kabupaten Tangerang

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Upaya diatas dijabarkan lebih teknis melalui upaya intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun aktivitas yang berkaitan langsung dengan upaya tersebut antara lain :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak melalui upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Sosialisasi kepada wajib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak

- para wajib pajak.
4. Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak.
 5. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Ekstensifikasi
- Ekstensifikasi adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara:
1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fokus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak.
 2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakannya mencakup :
 - a. Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
 - c. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - d. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif, agar mereka mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daerah;
 - f. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - g. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan lain-lain pendapatan yang sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Untuk kelompok pendapatan transfer, arah kebijakannya mencakup:
 - a. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana transfer bagi kabupaten/kota;
 - c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, arah kebijakannya mencakup perkiraan penerimaan dari Biaya Operasional Sekolah (BOS)

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. Belanja pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja hibah;

Belanja yang bentuk belanjanya berupa uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

d. belanja bantuan sosial;

Belanja yang bentuk belanjanya berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan belanja operasi antara lain :

- a. Penyesuaian Belanja Pegawai untuk penganggaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan, THR dan Gaji ke-13
- b. Pemenuhan belanja Non ASN selama 12 bulan, THR dan Gaji ke-13 untuk Non ASN
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem
- d. Penambahan target Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- e. Penambahan target Sanitren
- f. Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat dalam penanganan Stunting
- g. Pemenuhan BPJS Kesehatan untuk Aparatur Desa selama 12 bulan
- h. Pelatihan keterampilan tenaga kerja dan wirausaha baru

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset. Batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Gubernur.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Arah kebijakan belanja modal antara lain :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Penataan wilayah pesisir
 - d. Peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik
 - e. Peningkatan penerangan jalan
 - f. Peningkatan gedung pemerintahan dalam kondisi baik
3. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Arah kebijakan belanja tidak terduga antara lain untuk penanganan kondisi darurat yang tidak direncanakan.
4. Belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bantuan keuangan Kabupaten Tangerang terdiri dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Transfer Dana Desa

Arah kebijakan belanja transfer antara lain untuk :

- a. Dukungan dalam menangani prioritas pembangunan Kabupaten
- b. Pemenuhan operasional Pemerintah Desa

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap Struktur RKPD Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Pergeseran (R-APBD2025)	Perubahan RKPD	Selisih (Bertambah/berkurang)	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	
						2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH						
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888	4.882.193.243.140,00	4.882.193.243.140	200.927.917.252	4.402.192.318.342	4.618.101.112.122
04.01.01	Pajak Daerah	3.929.570.000.000	3.763.500.000.000	3.929.570.000.000	166.070.000.000	3.490.363.924.921	3.615.835.888.430
04.01.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886	188.405.540.046,00	188.405.540.046	15.108.248.160	123.597.357.167	210.912.730.996
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940	63.929.911.819,00	63.929.911.819	3.420.389.879	64.854.494.983	60.606.042.461
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	683.958.512.062	700.287.791.275,00	700.287.791.275	16.329.279.213	723.376.541.271	730.746.450.235
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.543.189.648.887	3.543.189.648.887,00	3.543.189.648.887	0	3.578.770.570.116	3.883.641.267.461
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.184.669.699.000	3.184.669.699.000,00	3.184.669.699.000	0	2.721.591.805.338	3.042.059.431.164
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887	358.519.949.887,00	358.519.949.887	0	857.178.764.778	841.581.836.297

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Pergeseran (R-APBD2025)	Perubahan RKPD	Selisih (Bertambah/berkurang)	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	
						2023	2024
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	42.497.100	5.394.000.000
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	- 0	0	0	42.497.100	5.394.000.000
	Jumlah Pendapatan	8.224.454.974.775	8.425.382.892.027,00	8.425.382.892.027	200.927.917.252	7.981.005.385.558	8.507.136.379.583
5	BELANJA						
05.01	BELANJA OPERASI	6.167.620.709.069	6.542.475.322.724,00	6.541.703.120.755	374.082.411.686	5.053.210.174.035	5.834.316.628.367
05.01.01	Belanja Pegawai	2.783.330.402.163	2.804.682.479.003,00	2.805.311.576.632	21.981.174.469	2.286.075.345.833	2.406.476.664.779
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.146.638.781	3.326.485.868.429,24	3.325.084.568.832	326.937.930.051	2.370.838.280.571	3.014.362.200.622
05.01.05	Belanja Hibah	365.574.068.125	390.837.375.291,00	390.837.375.291	25.263.307.166	385.571.297.631	396.279.562.966
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	20.569.600.000	20.469.600.000,00	20.469.600.000	-100.000.000	10.725.250.000	17.198.200.000
05.02	BELANJA MODAL	1.465.120.939.690	1.637.323.537.049,77	1.638.095.739.019	172.974.799.329	2.002.395.147.585	1.990.721.350.612
05.02.01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340	106.598.843.340,00	106.598.843.340	0	227.277.177.586	391.732.280.665
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.704.669.033	204.679.434.585,00	429.749.129.174	38.044.460.141	324.366.940.867	535.315.347.072
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	436.568.092.297	569.397.944.699,40	569.397.844.699	132.829.752.402	580.639.094.647	320.580.002.197

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Pergeseran (R-APBD2025)	Perubahan RKPD	Selisih (Bertambah/berkurang)	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	
						2023	2024
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	506.057.535.310	508.149.694.955,97	508.149.694.096	2.092.158.786	833.196.833.734	708.059.201.545
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500	23.551.895.500,00	23.551.895.500	0	36.063.250.751	29.490.933.730
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	639.904.210	224.946.718.970,00	648.332.210	8.428.000	851.850.000	5.543.585.403
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.000.000.000	46.663.368.215,00	47.889.763.574	25.889.763.574	14.997.736.734	20.136.742.454
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000	46.663.368.215,00	47.889.763.574	25.889.763.574	14.997.736.734	20.136.742.454
05.04	BELANJA TRANSFER	939.713.326.016	957.074.321.680,00	957.074.521.700	17.361.195.684	819.921.420.195	869.579.700.196
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	388.414.633.516	405.775.892.200,00	405.775.829.200	17.361.195.684	327.417.814.437	347.428.524.162
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500	551.298.429.480,00	551.298.692.500	0	492.503.605.758	522.151.176.034
	Jumlah Belanja	8.594.454.974.775	9.183.536.749.669,00	9.184.763.145.048	590.308.170.273	7.890.524.478.549	8.714.754.421.629
	Total Surplus/(Defisit)	-370.000.000.000	-758.153.857.662,00	-759.380.253.021	-389.380.253.021	90.480.907.009	207.618.042.046
6	PEMBIAYAAN						
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000	788.153.857.662,00	788.153.857.662	388.153.857.662	928.757.388.059	1.009.238.295.068
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000	788.153.857.662,00	788.153.857.662	388.153.857.662	928.757.388.059	1.009.238.295.068
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	400.000.000.000	788.153.857.662,00	788.153.857.662	388.153.857.662	928.757.388.059	1.009.238.295.068
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	30.000.000.000,00	30.000.000.000	0	10.000.000.000	12.240.000.000

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Pergeseran (R-APBD2025)	Perubahan RKPD	Selisih (Bertambah/berkurang)	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	
						2023	2024
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	12.240.000.000
	Pinjaman Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0-	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000	30.000.000.000,00	30.000.000.000	0	10.000.000.000	12.240.000.000
	Pembiayaan Netto	370.000.000.000	758.153.857.662,00	759.380.253.021	389.380.253.021	918.757.388.059	996.998.295.068
	Sisa Lebih Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	1.009.238.295.068	789.380.253.022
	TOTAL APBD	8.624.454.974.775	9.213.536.749.669	9.214.763.145.048	590.308.170.273	7.900.524.478.549	8.726.994.421.629

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari penyelenggaraan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 adalah:

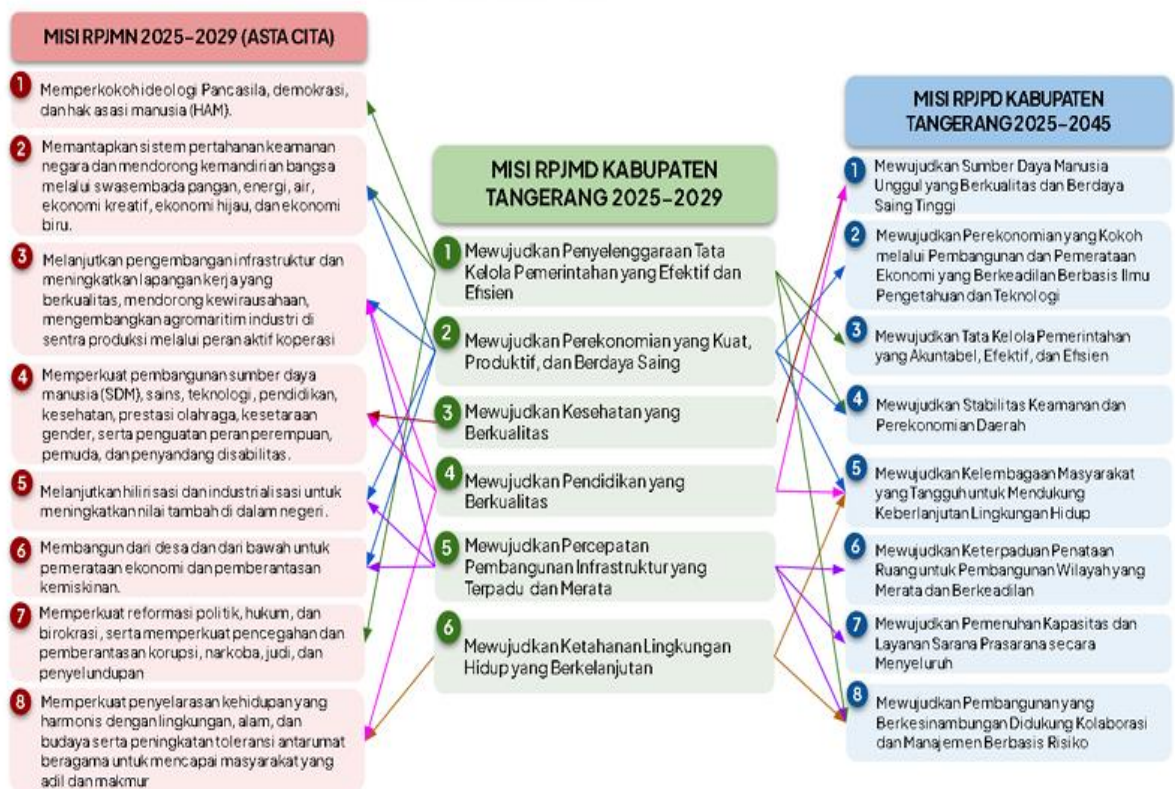
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANGERANG GEMILANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi;
- Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien;
- Misi 4 : Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Perekonomian Daerah;
- Misi 5 : Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup;
- Misi 6 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
- Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh;
- Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko;

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2018-2023 serta memperhatikan hasil evaluasi RPD tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang 2025-2045 yang telah diselaraskan dengan misi RPJMN dan berdasarkan pada analisis arah kebijakan RPJPD tahap I serta memperhatikan hasil evaluasi RPJMD periode 2019-2023 dan RPD periode 2024-2026, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 sebagai berikut :

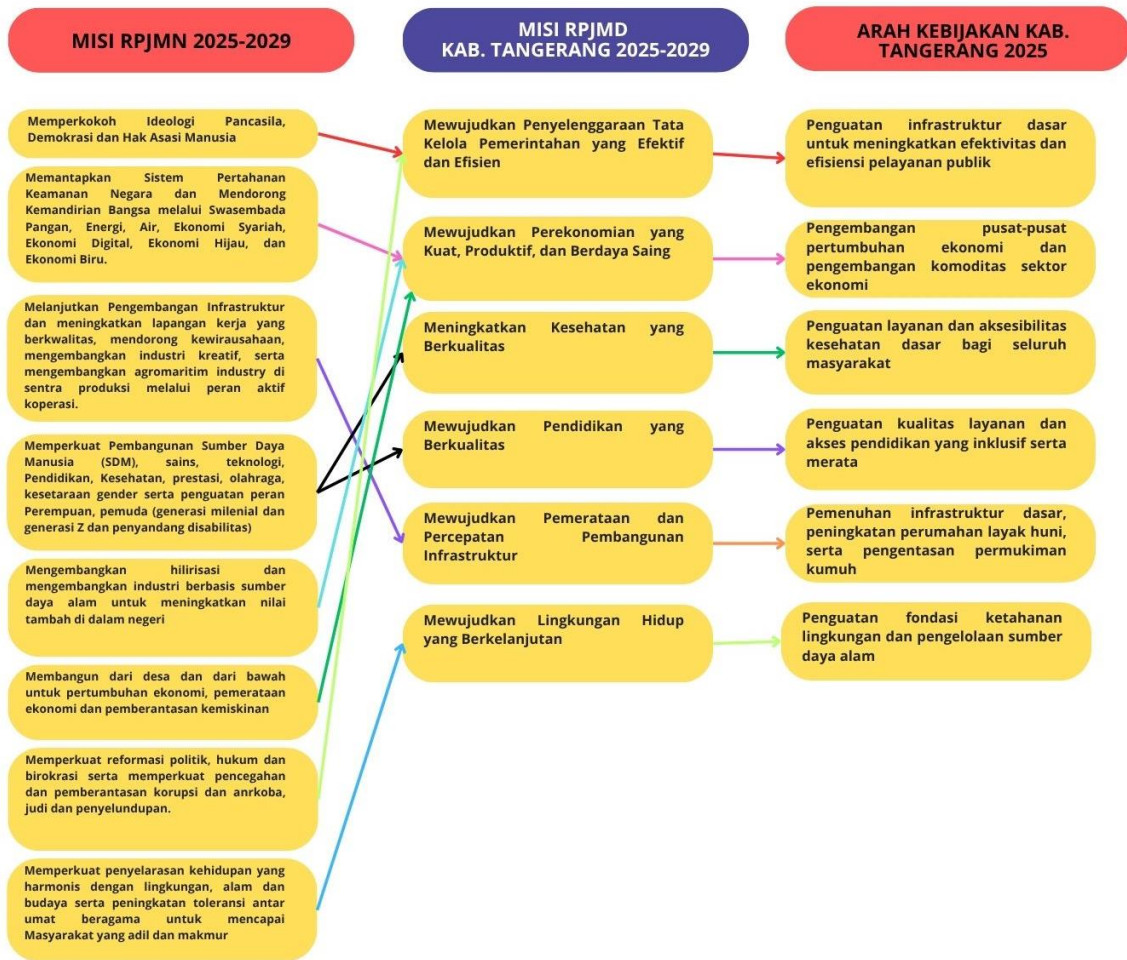


Gambar 4.1

Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Tangerang
 Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Keselarasan Misi RPJMN 2025-2029, Misi RJMD Kab. Tangerang 2025-2029 dan Arah Kebijakan Kab. Tangerang 2025



Gambar 4.2

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun Pertama dari Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil dengan target indikator seperti yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)						
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas
			Indikator	2025	2030	
Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	79,90	88,54	
			Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,23	4,40	PRIMA 1) Penyediaan Mobil Training Unit (MTU) 2) Pembangunan Gedung diorama daerah 3) Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda
			Nilai Sistem Merit	352,50	365,00	
			Indeks Professionalitas ASN	75,00	85,00	
			Opini BPK	WTP	WTP	
			Indeks Kemandirian Fiskal	0,54	0,63	
			Nilai SAKIP	77,81	81,36	
			Indeks SPBE	4,18	4,95	PRIMA 1) Digitalisasi Akses Layanan Kemasyarakatan di kecamatan 2) Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu
		Nilai Maturitas SPIP	4,0	4,10		
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,40	
			Tingkat Inflasi (%)	1,8 - 2,00	2,0 ±1	
		Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	33,55 - 33,75	33,70 - 33,90	PROSPEK 1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan) 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,15 - 11,35	11,33 - 11,50	
			Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	6,07 - 6,30	6,21 - 6,30	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,76	2,15	
		Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	9,56	11,34	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan 3) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77 - 2,00	3,00 - 4,75	
			Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,50	2,99	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,69	2,93	
	Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor (%)	41,2	47,50			
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,70	4,00	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)	

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)						
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas
			Indikator	2025	2030	
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pariwisata Daerah			
			Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	59,90	93,38	
			Persentase Penduduk Miskin (%)	6,05	4,59	
			Indeks Gini (Indeks)	0,268	0,255	
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	35,5	56,35	PROSPEK
			Indeks Desa Membangun (Indeks) Indeks Desa (Indeks)	0,783	0,82	1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan)
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,00	5,40	PROSPEK
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,08	71,19	1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)
		Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya (%)	1,69	2,59	PROSPEK 1) Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,43	65,92	PROSPEK
	Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,39	0,35	1) Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan		
		Indeks Kualitas Keluarga	78	83,00		
Misi 3 Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)	77,70	82,63	
		Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	N/A	N/A	TUNAS 1) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia; 2) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih; 3) Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual; 4) Penyediaan Mobil Siaga Desa
			Prevalensi Stunting	21,4	16,59	TUNAS 1) Pencegahan dan penanganan Balita Stunting melalui pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui; 2) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;
		Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,90	100,00	TUNAS 1) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia; 2) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih; 3) Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual; 4) Penyediaan Mobil Siaga Desa
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65	70,00	TUNAS 1) Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual;
Misi 4	Meningkatkan Kualitas		Indeks Pendidikan	N/A	N/A	

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)						
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas
			Indikator	2025	2030	
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan Masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A	
			Indeks Harmoni	7,09	7,24	
		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	9,63	10,66	SETARA 1) Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) 2) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 3) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta
			Harapan lama sekolah (tahun)	13,43	14,24	
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Olahraga	N/A	N/A	SETARA 1) Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten
		Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52	54,1 – 56,2	SETARA 1) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 2) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta 3) Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan
			Indeks Literasi Masyarakat	N/A	N/A	SETARA 1) Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan
		Indeks Karakter Masyarakat	N/A	N/A		
Misi 5 Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,00	N/A	
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Persentase Rumah Layak Huni (%)	89,66	95,99	SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			SELARAS 1) Pengelolaan dan Pengolahan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir
			Indeks Infrastruktur Dasar			SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional 2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh Pemda
			Indeks Aksesibilitas Transportasi Wilayah	0,79	N/A	
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	96	98,52	"SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset	

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)						
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas
			Indikator	2025	2030	
						Mangrove skala Nasional 2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh Pemda "
			Persentase RTH kawasan perkotaan (%)	N/A	N/A	SELARAS 1) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Misi 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,57	62,26	
			Indeks Risiko Bencana (%)	143,60	149,19	
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	8,90	24,42	
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,86	62,86	SELARAS 1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, 2) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	69,36	71,36	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	46,67	47,02	
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	90,47	92,00	
	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24,0	30,99	SELARAS 1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku,
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	98,74	100,00	
			Cakupan Sarana Air Bersih (%)	65,59	90,41	
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,20	1,56	
		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	78,16	82,49		
		Indeks Kondisi Jaringan Irigasi (Indeks)	N/A	N/A		

Tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2025 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			
Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar	Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
			Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik
			Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
		Optimalisasi digitalisasi kearsipan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD
		Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE	Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang
		Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu
		Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah	Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik
		Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)	Integrasi sistem data kependudukan secara optimal
			Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat
		Optimalisasi pengelolaan administrasi kependudukan	Mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi teknologi/elektronik
		Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja
			Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja
Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja			
Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan			

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan	Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan
		Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD	Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi
		Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah	Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
		Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masy. desa)	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel
		Meningkatkan kinerja pengawasan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP
		Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal	Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN
			Mendorong pengembangan kompetensi ASN
			Optimalisasi uji kompetensi ASN
			Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM
		Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak
		Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS	Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS
			Mendorong optimalisasi ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS
		Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
			Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri
			Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas)
			Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal
			Oprimalisasi penindakan gangguan kamtibmas
			Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Peningkatan daya saing industri	Pengembangan fasilitas pendukung perindustrian
			Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri
		Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok	Mendorong daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global)
			Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar
			Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian
			Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan
			Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) pertanian dan peternakan
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan	Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan
			Pengembangan sarana-prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan
			Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan
		Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata
			Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD	Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif
			Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD
		Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan	Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD
			Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausahaan
			Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi wirausahaan
		Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi	Sinkornisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L)
			Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian Desa	Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi
			Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi
Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah			
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja		Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa	
		Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES	
Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan		Pengembangan infratsruktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri	
	Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll)		
	Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi	
		Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply-demand tenaga kerja	
		Peningkatan cakupan layanan jamsostek	

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Pengentasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja	
		Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Pengembangan upaya perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan Mensinergikan pemberdayaan masyarakat utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, anak terlantar, dll)	
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	
	MISI 3 : Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar			Mendorong integrasi antar layanan kesehatan Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan	
Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan			Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk	
Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil			Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi	
Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus stunting			Meningkatkan integrasi sistem monitoring stunting	
Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat			Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan	Mendorong peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan
		Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan		

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
		Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit	Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS
MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas			
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
		Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum
			Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi
			Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan
		Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
	Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif	
		Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan	
	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Peningkatan daya saing olahraga	Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas
	Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat
Meningkatnya pengembangan potensi kebudayaan		Mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap kesenian lokal	
	Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenian		
MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur			
Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan			Pengembangan sarana-prasarana permukiman yang memadai
			Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan
		Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu	Memenuhi serta pengembangan sarana-prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas
			Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya
		Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara	Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah
			Penegakan regulasi dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah dan limbah
	Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi	Penyediaan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi melalui kerjasama dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi	
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya.	Penegakan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang.
			Penegakan bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh.
			Peningkatan luas dan pengelolaan RTH publik
Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang.		Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahan sistem informasi spasial	
MISI 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih
			Pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih
			Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT
		Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup.	Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang
		Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Optimalisasi tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana	Optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami perubahan sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Penjabaran program pembangunan daerah prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang terdiri atas lima program prioritas dengan beberapa kegiatan prioritas turunannya, yaitu:



Gambar 4.3
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang

1) PRIMA : PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART

- a. Digitalisasi Akses Layanan Kemasayarakatan di Kecamatan
- b. Penyelenggaraan *Command Center* Data Terpadu
- c. Penyediaan Mobil Training Unit (MTU)
- d. Pembangunan Gedung diorama
- e. Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda

2) PROSPEK : PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH

- a. Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM
- b. Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan) pada 25 Desa
- c. Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan di 50 desa
- d. Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan
- e. Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park)

3) TUNAS : TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT

- a. Pencegahan dan penanganan Balita Stunting melalui pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;
- b. Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;
- c. Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih;
- d. Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual;
- e. Penyediaan Mobil Siaga bagi desa dan kelurahan

4) SETARA : SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK

- a. Pojok Baca Digital dan Internet Gratis di setiap kecamatan
- b. Pembangunan *Trauma Healing Centre* dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten
- c. Pembangunan Sekolah Inklusif dan *Boarding School* untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)

- d. Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan
- e. Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta

5) SELARAS : SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH DAN BERKESINAMBUNGAN

- a. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional.
- b. Pengelolaan dan Pengolahan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir
- c. Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh pemerintah daerah
- d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan.
- e. Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, Sekaligus Kawasan Wisata Baru

Tabel 4.3
Penyelarasan Prioritas Nasional dan Program Prioritas RPJMD
Kabupaten Tangerang Target Tahun 2025

No.	Kegiatan Prioritas	Target 2025	Prioritas Nasional
PRIMA - PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART			Pengembangan Industri Kerajinan Dan Memfasilitasi Dalam Mempromosikan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)
1	Digitalisasi Akses Layanan Kemasyarakatan kecamatan	5 Kecamatan	
2	Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu	Penyiapan Rancang Bangun Command Center 1 Unit	
3	Penyediaan Mobile Training Unit (MTU)	MTU Tata Busana dan Otomotif 2 Unit	
4	Pembangunan Gedung Diorama Daerah	Review DED	
5	Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda	DED dan Renovasi Gedung Pemuda (Eksterior dan Interior)	
PROSPEK - PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH			Dukungan Swasembada Pangan
1	Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM	Review DED	
3	Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi (Pembentukan KUBE) 10 Unit 2. Pembangunan Rumah Layak huni Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah 10 Unit 3. Pengembangan UMKM/Koperasi Merah Putih (Bantuan Modal dan Bantuan Sarana Prasarana) 4. Pengembangan Budidaya Ikan Payau 	

No.	Kegiatan Prioritas	Target 2025	Prioritas Nasional
4	Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan	4 kali kegiatan pasar murah per tahun pada 29 kecamatan	Pengendalian Inflasi Di Daerah
TUNAS - TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT			Pencegahan Stunting Dan Kemiskinan Ekstrim
1	Pencegahan dan penanganan Balita Stunting melalui pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;	Penanganan Balita Stunting 6.520 dan Penanganan 900 Ibu Hamil KEK melalui TMT Lokal	
2	Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;	Penambahan Sasrana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 1 RSUD, Penambahan Sasrana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu (rehabiltasi dan penambahan alkes dan pemeliharaan alkes) 8 Puskesmas, Pembangunan 8 Pustu dan Penyediaan Mobil Puskesmas Keliling 32 Unit	
4	Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual;	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pada Puskesmas dan Pustu 1 Aplikasi	
SETARA - SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK			Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Dan Kesehatan
1	Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan	29 kecamatan	
2	Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten	Review DED sentra Olahraga dan Pembangunan Trauma Healing 1 Unit	
3	Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Aspontren Berserta Sarana Pendukung 60 Unit 2. Menyusun Regulasi Inklusi 3. Pendataan Siswa Inklusi 4. Menyusun Masterplan penentuan Sekolah Inklusi 5. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan pada Pendidikan formal 15 orang 6. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan baik pada Pendidikan pelatihan 500 orang 7. penyediaan layanan klinis kepada peserta didik penyandang disabilitas pembentukan komunitas belajar Pendidikan inklusif pada masing-masing jenjang 8. Pembentukan komunitas belajar pendidikan inklusi 	
4	Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan	Review DED	
5	Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana	1. Beasiswa Sekolah Swasta Gratis	

No.	Kegiatan Prioritas	Target 2025	Prioritas Nasional
	Pendidikan ke Sekolah Swasta	2. Beasiswa Perguruan Tinggi 235 Mahasiswa	
SELARAS - SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH, DAN BERKESINAMBUNGAN			Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
1	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional	1. 1 Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR 1000 Rumah 2. Penyiapan DED Pusat Riset Mangrove	
3	Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh Pemda	1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 3 Km 2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota 3 Unit	
4	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyiapan Design RTH 5 Unit	
5	Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku,	1. Lanjutan Tandon Sudirman 2. Polder Cibadak Baru	

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang

Tabel 4.4
Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)							
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas Kab. Tangerang	Prioritas Nasional 2025
			Indikator	2025	2030		
Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	79,90	88,54	PRIMA 1) Penyediaan Mobil Training Unit (MTU) 2) Pembangunan Gedung diorama daerah 3) Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda	Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
			Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,23	4,40		
			Nilai Sistem Merit	352,50	365,00		
			Indeks Profesionalitas ASN	75,00	85,00		
			Opini BPK	WTP	WTP		
			Indeks Kemandirian Fiskal	0,54	0,63		
			Nilai SAKIP	77,81	81,36		
			Indeks SPBE	4,18	4,95		
Nilai Maturitas SPIP	4,0	4,10					
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,40	PROSPEK 1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan) 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan	Pengendalian Inflasi di daerah
			Tingkat Inflasi (%)	1,8 - 2,00	2,0 ±1		
		Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	33,55 - 33,75	33,70 - 33,90		
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,15 - 11,35	11,33 - 11,50		
			Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	6,07 - 6,30	6,21 - 6,30		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,76	2,15		
		Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	9,56	11,34		
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77 - 2,00	3,00 - 4,75		
			Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,50	2,99		
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,69	2,93		
Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor (%)	41,2		47,50	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan 3) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)			

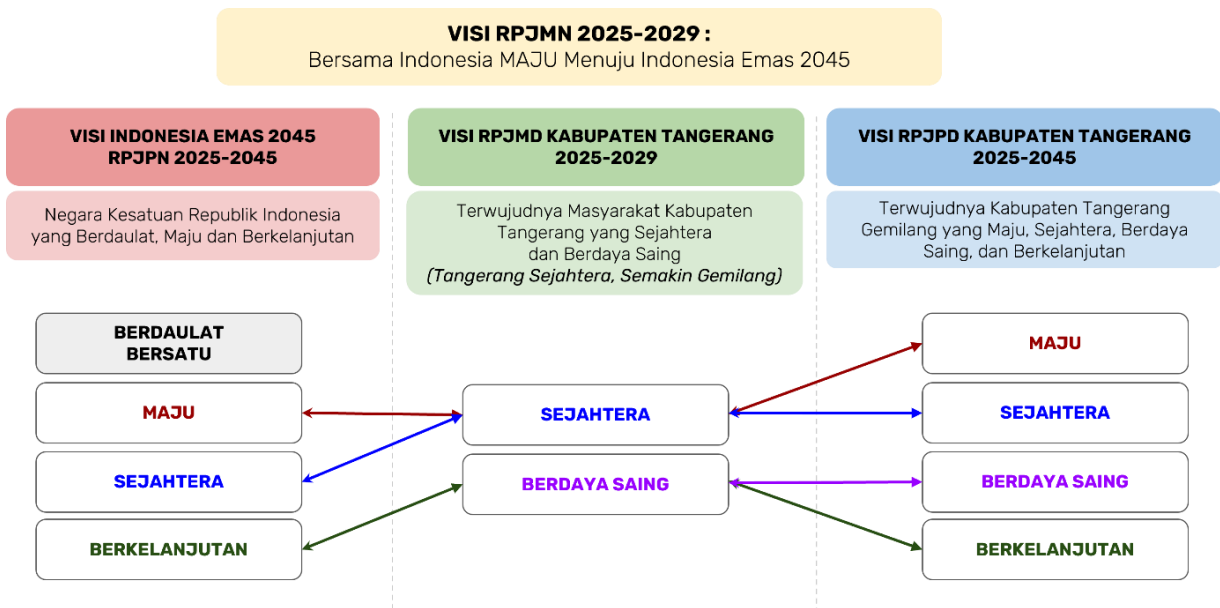
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)									
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas Kab. Tangerang	Prioritas Nasional 2025		
			Indikator	2025	2030				
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,70	4,00	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)			
			Indeks Pariwisata Daerah						
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	59,90	93,38		Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	
				Persentase Penduduk Miskin (%)	6,05	4,59			
				Indeks Gini (Indeks)	0,268	0,255			
		Meningkatnya Kemandirian Desa			Persentase Desa Mandiri (%)	35,5	56,35	PROSPEK 1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan)	
					Indeks Desa Membangun (Indeks) Indeks Desa (Indeks)	0,783	0,82		
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,00	5,40	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,08	71,19		
	Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS			Persentase PPKS yang Berdaya (%)	1,69	2,59	PROSPEK 1) Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan		
	Meningkatnya Kualitas Keluarga			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,43	65,92	PROSPEK 1) Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan		
				Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,39	0,35			
				Indeks Kualitas Keluarga	78	83,00			
Misi 3 Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)	77,70	82,63		Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	N/A			N/A	TUNAS 1) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia; 2) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih; 3) Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual; 4) Penyediaan Mobil Siaga Desa
				Prevalensi Stunting	21,4			16,59	TUNAS 1) Pencegahan dan penanganan Balita Stunting melalui pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)							
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas Kab. Tangerang	Prioritas Nasional 2025
			Indikator	2025	2030		
						2) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;	
		Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,90	100,00	TUNAS 1) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia; 2) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih; 3) Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual; 4) Penyediaan Mobil Siaga Desa	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65	70,00	TUNAS 1) Penyelenggaraan Layanan kesehatan berbasis virtual;	
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Berkualitas		Indeks Pendidikan	N/A	N/A		Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	N/A		
			Indeks Harmoni	7,09	7,24		
		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	9,63	10,66	SETARA 1) Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) 2) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 3) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta	
			Harapan lama sekolah (tahun)	13,43	14,24		
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Olahraga	N/A	N/A	SETARA 1) Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten	
		Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52	54,1 – 56,2	SETARA 1) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 2) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta 3) Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan	
			Indeks Literasi Masyarakat	N/A	N/A	SETARA 1) Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan	
			Indeks Karakter Masyarakat	N/A	N/A		

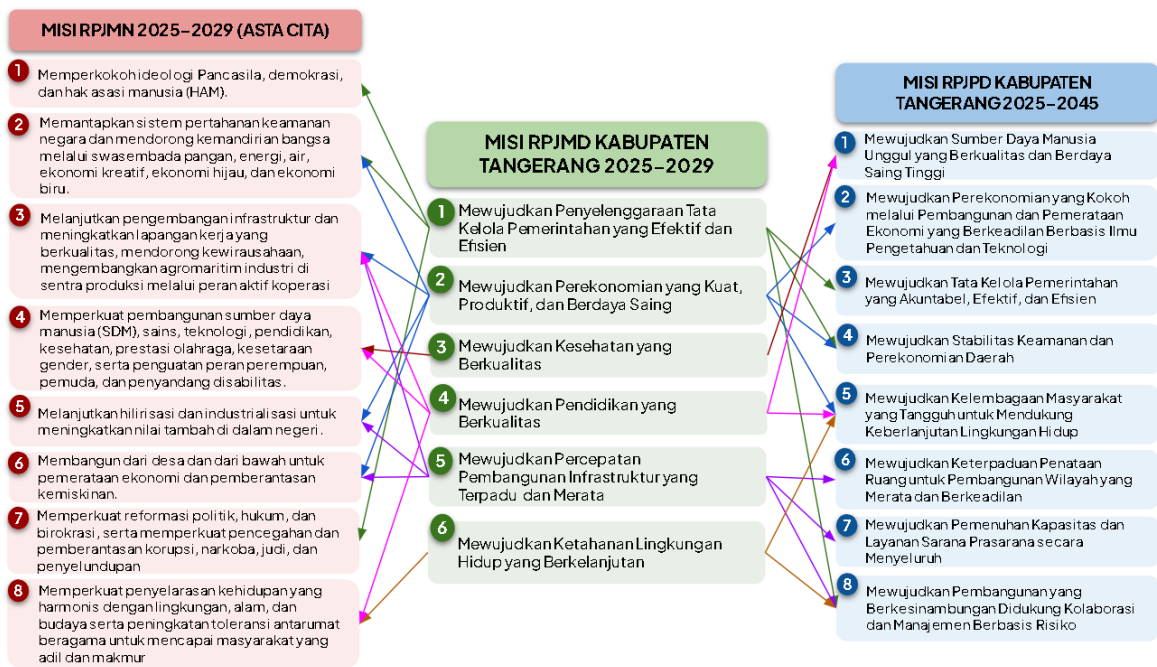
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)							
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas Kab. Tangerang	Prioritas Nasional 2025
			Indikator	2025	2030		
Misi 5 Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,00	N/A		Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Persentase Rumah Layak Huni (%)	89,66	95,99	SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional	
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			SELARAS 1) Pengelolaan dan Pengolahan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir	
			Indeks Infrastruktur Dasar			SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional 2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh Pemda	
			Indeks Aksesibilitas Transportasi Wilayah	0,79	N/A		
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	96	98,52	"SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional 2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan permukiman, serta Penyediaan angkutan Sekolah dan angkutan publik yang disubsidi oleh Pemda "			
	Persentase RTH kawasan perkotaan (%)	N/A	N/A	SELARAS 1) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Misi 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,57	62,26		Dukungan swasembada pangan
			Indeks Risiko Bencana (%)	143,60	149,19		
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	8,90	24,42		
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,86	62,86	SELARAS 1) Pembangunan Kolam	
Indeks Kualitas Udara (Indeks)	69,36		71,36				

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing” (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)							
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan			Program Prioritas Kab. Tangerang	Prioritas Nasional 2025
			Indikator	2025	2030		
		Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	46,67	47,02	Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, 2) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	90,47	92,00		
		Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	24,0	30,99	SELARAS 1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku,	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	98,74	100,00		
			Cakupan Sarana Air Bersih (%)	65,59	90,41		
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2,20	1,56		
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	78,16	82,49		
			Indeks Kondisi Jaringan Irigasi (Indeks)	N/A	N/A		

Sumber : Analisis Penyusun, 2025



Gambar 4.4
 Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, RPJPN dan RPJPD Kabupaten Tangerang
 Sumber: Analisis Penyusun, 2024



Gambar 4.5
 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Tangerang
 Sumber: Analisis Penyusun, 2024

VISI RPJMD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025-2029
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing
(Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)



Program Unggulan yang menjadi program prioritas juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut



Gambar 4.6
Program Unggulan yang menjadi program prioritas

Tabel 4.5
Perbandingan Sasaran Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

No.	Target RPJMD Provinsi Banten 2025-2029				Target RPJMD Kab. Tangerang 2025-2029			
	Sasaran	Indikator	2025	2029	Sasaran	Indikator	2025	2029
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	72,21-72,42	106,4	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,36
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Nilai)	25,62	47,50-49,35		PDRB Per Kapita (Rp Juta)	59,90	85,96
		Kontribusi PDB Sektor Industri (%)	30,48-31,20	31,20-32,10		Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	11,58	11,34
						Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	33,55 - 33,75	33,65 - 33,85

No.	Target RPJMD Provinsi Banten 2025-2029				Target RPJMD Kab. Tangerang 2025-2029			
	Sasaran	Indikator	2025	2029	Sasaran	Indikator	2025	2029
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	2,42-3,42	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	4,88
		Rasio Gini (indeks)	0,344-0,365	0,326-0,330		Rasio Gini (indeks)	0,268	0,258
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,94	3,8		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,00	5,50
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,33	7,9				
3	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (Nilai)	3,7	3,9	Kepemimpinan Daerah sebagai Hub Integrasi Ekonomi Pulau Sumatera-Jawa serta Penyangga Industri Nasional	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,70	3,94
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,54	0,59	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (indeks)	74,51	76,74
						Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	76,25	77,93
5	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	43,56	56,65	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	8,9	21,32
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	66,92	67,93		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	61,57	62,58

Sumber: Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029; Analisis Penyusun

4.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahul, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Capaian dan target pembangunan yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten disajikan tabel 4.6

Tabel 4.6
Interkoneksi Prioritas Daerah, Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional serta Target Indikator Sasaran Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
1	PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Sasaran 2.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan				
					Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	Persen	3,48	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
					Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Persen	5,12	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
					Persentase daya saing produk unggulan local	Persen	26,52	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
					Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	3,57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI
								PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
								Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Program Promosi Penanaman Modal
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
								Program Pelayanan Penanaman Modal
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
								Program Pemasaran Pariwisata
								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
								Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
								PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
								PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
								PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
							Program Pengembangan Ekspor	
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
								Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
								Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
								Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
								Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
								PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
								PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				Sasaran 2.2. Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7407	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
								PROGRAM PENATAAN DESA
								PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
				Sasaran 2.3. Meningkatnya PPKS yang berdaya	Persentase PPKS yang berdaya	Persen	1,69	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
								PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
								PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2	PN-2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Sasaran 2.1. Meningkatnya Daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai	68,25	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
								PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
								PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
3	PN-3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Prioritas 1. Meningkatkan SDM yang berdaya saing	Sasaran 2.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,70	Program Pengelolaan Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
								Program Pengembangan Kurikulum
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
								Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
								Program Pembinaan Perpustakaan
				Sasaran 2.1.2. Meningkatkan kualitas kesehatan	Indeks kesehatan	Indeks	0,79	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Sasaran 2.1.4. Meningkatkan Partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	63,17	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
								Program Perlindungan Perempuan
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
								Program Perlindungan Khusus Anak
				Sasaran 2.1.4. Meningkatkan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	Angka	1,15	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Sasaran 2.1.5 Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	2,26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
4	PN-4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Prioritas 1. Meningkatkan SDM yang berdaya saing	Sasaran 2.1.3.Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan pemuda	Indeks	53	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN
								PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN
5	PN-5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Sasaran 2.3. Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
								PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6	PN-6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Prioritas 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;	Prioritas 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Sasaran 3.1.1.Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Indeks	85	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
					Persentase realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RT/RW	Persen	55	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					Rasio Luas Kawasan permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Point	0,9442	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
					Rasio konektivitas kabupaten	Point	0,83	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
								Program Penataan Bangunan Gedung
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
								PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
								PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
								Program Penatagunaan Tanah
								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Sasaran 3.1.2.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan Tangguh terhadap bencana Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan Tangguh terhadap bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56,89	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
					Indeks Resiko bencana (IRBI)	Indeks	115	Program Penanggulangan Bencana
								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
								Program Perencanaan Lingkungan Hidup
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
								Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
								Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
								Program Pengelolaan Persampahan
7	PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; dan	Prioritas 4. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 4.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	Indeks	78	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Prioritas 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
								Program Perekonomian dan Pembangunan
					Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	0,525	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
					Opini BPK	Predikat	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
					Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	Program Kepegawaian Daerah
								Program Pengembangan SDM
					Maturitas SPIP Terintegrasi	Lecvel	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
					Indeks SPBE	Indeks	3,19	Program Informasi dan Komunikasi Publik
								Program Aplikasi Informatika
								Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
					Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
								Program Pendaftaran Penduduk
								Program Pencatatan Sipil
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan
								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
								Program Pengelolaan Arsip
								Program Perizinan Penggunaan Arsip
								Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS
								Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
								Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.3.1 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sementara untuk tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 adalah "Pembangunan Kolaboratif Yang Inklusif Untuk Memperkokoh Masyarakat Banten Yang Modern Dalam Rangka Mencapai Banten Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing "dan tema pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah "Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam upaya Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kolaborasi Antar Sektor".

Pada Perubahan RKPD tahun 2025 ini terdapat perubahan arah kebijakan

pembangunan daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Pemerintah pusat dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi Daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



Gambar 4.7
Penyelarasan Tema Pembangunan RKP 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan, Program Makan bergizi Gratis (MBG), Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, Pengendalian Inflasi di daerah, Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, Dukungan swasembada pangan, dan Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Keterkaitan prioritas pembangunan antara Pemda Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional merupakan hal yang sangat penting. Dibawah ini disajikan sinkronisasi prioritas pembangunan.



Gambar 4.8
Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2025

Tabel 4.7
Capaian dan Target IKK Outcome Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 119813. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 130069	92,1149544	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 417579. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 383447	108,901360 6	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			<p>dan sertifikat pendidik</p> <p>15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p> <p>16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah 	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 174995. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 183040	95,6047858	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 16004. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 18120	88,3222958	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 2999. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 3459706	0,8668367	0,1
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 24. Jumlah RS di kabupaten/kota = 24	100	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 58714. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 58714	100	100
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 58410. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 58410	100	100
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 55500. Jumlah bayi baru lahir di	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
					kabupaten/kota = 55500		
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 284085. Jumlah balita di kabupaten/kota = 284085	100	100
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 556948. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 556948	100	100
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 2246044. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 2246044	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 192092. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 192092	100	100
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 729628. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 729628	100	100
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 43632. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 43632	100	100
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
				elayanan kesehatan jiwa sesuai standar	kesehatan sesuai standar = 4255. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 4255		
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 48636. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 48636	100	100
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 82235. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 82235	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	0	10%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	0	6%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 879.93. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 13716	6,4153543	7,64%
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 678384. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 1107551	61,2508137	54%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 1073115. Jumlah rumah di Kabupaten A = 1107551	96,8907978	98,60%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 1858. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 1872	99,2521368	96%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 944.82. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 992.61	95,1854203	93,77%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan 	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 187. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 187	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			<p>sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan</p>				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan 	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 1253. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 1253	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			<p>sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang</p>				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			<p>menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p> <p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<p>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</p> <p>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</p> <p>3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</p> <p>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</p> <p>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</p> <p>8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan</p>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 10. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 10	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<p>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah</p>	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 126. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 126	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 167. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 5465	3,0558097	9,88
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni;	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 31977. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 1107551	2,8871808	3,66

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 89069. Jumlah unit rumah kab/kota = 231733	38,4360449	27,66

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	Jumlah pengaduan yang ditangani = 25. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 25	100	100
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 15. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 15	100	100
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2452679. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
					target yang ditetapkan = 2452679		
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 2436222. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 3293533	73,9698676	100
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 208. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 208	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran 	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 373. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 373	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,67	13

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 1015. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1015	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			<p>terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan</p> <p>13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah</p> <p>14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan</p> <p>15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p> <p>16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p> <p>17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p> <p>18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p>				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 914. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 914	100	100
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 3. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 5	60	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 712. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 520549	0,1367787	6
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 113998.21. Jumlah tenaga kerja = 520549	21,899,611 8	59,000,0 00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan kepentingan 10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 11. Jumlah perselisihan PHK 12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 3039. Jumlah Perusahaan = 6320	48,085443	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<p>1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota</p> <p>3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota</p> <p>4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota</p> <p>5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja</p> <p>6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota</p> <p>7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota</p> <p>8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</p> <p>9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata</p> <p>11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan</p> <p>12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya</p> <p>14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk</p>	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 28448. Jumlah pencaker yang terdaftar = 37074	76,7330204	74

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 6793236983968. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 8714894514624	77,9497328	51,82
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 179. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 179	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi 7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 49. Jumlah penduduk perempuan = 1204037	4,0696424	9,26

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 195.723. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 204.56	9,5	9,05

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 56809379.18. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 56809379.18	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 294452. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 301639	97,6173505	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 2779487. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 56809379.18	4,8926551	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	0	0
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 1	0	0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1	0	0
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		55,87	56,25
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 536920. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 845543	63,5000231	57,5

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota 4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. 	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 50. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 200	25	11

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 2458208. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 2458216	99,9996746	99,47
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 583243. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 1001407	58,242353	70
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 936020. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 1024548	91,3593116	99,5

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan 	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 43. Jumlah PD = 59	72,8813559	85,48
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 18. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 43	41,8604651	10,31

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<p>1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan</p> <p>2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun</p> <p>3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p> <p>4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</p> <p>5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</p>	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,84	2,07

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 438598. Jumlah Pasangan Usia Subur = 580386	75,5700517	71,5
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 28165. Jumlah Pasangan Usia Subur = 580386	4,8528049	10,1

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,4	0,79
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,35	0,8

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	<p>1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p> <p>3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p>	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 60. Jumlah PD = 60	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	<p>1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> <p>9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data</p>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 14. Jumlah Layanan Publik = 14	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			pemerintah 10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 11. Persentase data yang dapat berbagi pakai 12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 2435870. Jumlah penduduk = 2435870	100	92.75

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</p>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 54. Jumlah seluruh koperasi aktif = 894	6,0402685	16

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			<p>9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan 	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 2450. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 61011	4,0156693	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota 	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -3416515. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 29689561	- 11,5074622	5,12

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 154. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 790670	0,0194772	0,3
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 9085. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 790670	1,1490255	0,74
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Peningkatan prestasi olahraga		37	50

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 60. jumlah PD = 60	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 60. jumlah PD = 60	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	<p>1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan</p> <p>2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p> <p>3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> <p>4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</p>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 606. Jumlah area penilaian = 645	93,9534884	58,14

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengiasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran 7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 0. Jumlah cagar budaya yang terdata = 1	0	4

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
			11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14. Pembentukan tim ahli cagar budata kab/kota 15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya 16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat				

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat 	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		69,34	79,71
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		52,7	55,64

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		100	38,8

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK 	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		100	33,3

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 43737.92. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 43110	101,456553	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam neger 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 7261. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 36386	19,9554774	3,57

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} = \frac{740539 - 3713919}{3713919}$	19,9395571	3,57

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 1129803. Jumlah kamar yang tersedia = 1169460	96,6089477	7

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 2904.43. Total PDRB Berlaku = 186104.15	1,5606476	1,55

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 706734713754. Total realisasi PAD = 4619607545898.5	15,2985877	14,15

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 322364. luas panen = 65292	4,93726643 4	4,94
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = - 869. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 2823	- 30,7828551	1
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			0	0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	0	0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :a. Pusat perbelanjaanb. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu 5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu 	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 24533. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 24533	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 13439. RDKK = 28284.731	47,5132678	38
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 2889346. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 2889346	100	100
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 174. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 773	22,5097025	4,5

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		146,58	100
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 229. Jumlah izin yang dikeluarkan = 4515	5,0719823	21,66
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	2

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 2. Jumlah izin yang dikeluarkan = 2	100	2
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100	100
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		100	0
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 748699356424. Jumlah APBD = 8714894514624	8,5910318	8,7

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Rasio PAD	Jumlah PAD = 4619607545898.5. Jumlah Pendapatan pada APBD = 8508627520109.5	54,2932163	46,84
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	3
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	3
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 5423462081496. jumlah belanja APBD = 8714894514624	62,2321024	84,1
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan		Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 2716	0	2
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 4629. Jumlah seluruh pengadaan = 12926	35,8115426	8,21
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2102939691486. total belanja operasi dan modal = 8180098466763	25,7079997	51
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai	22,4544423	70

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
				Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 329825304633. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 1468864379539		
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 2517. Jumlah seluruh pegawai = 3175	79,2755906	80
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 723. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 3175	22,7716535	32

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET
						Capaian 2024	2025
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 723. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 723	100	85
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 8714894514624. Total Belanja APBD = 7679570516011	13,4815352	93,7
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 4619607545898. Total PAD dalam APBD = 3725463206124	24,0008904	120
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan		Manajemen Aset		4	Ada

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA	TARGET 2025
						Capaian 2024	
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 790731300553.54. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 7890524478549	10,0212768	Ada
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 8714754421629. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 9092893599225	95,8413769	Ada
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	100	Ada

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan pada triwulan I, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2026 dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Agenda pendanaan pembangunan Kabupaten Tangerang tahun 2025 diprioritaskan kepada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah meliputi Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia; Meningkatkan Perekonomian Masyarakat; Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, dan Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tabel 5.1
Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp) Murni	Alokasi Anggaran (Rp) Perubahan
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	3.071.680.052.340,00	3.861.007.073.270,00
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1.165.642.997.963,00	1.465.642.997.963,00
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	2.103.795.577.893,00	2.203.795.577.893,00
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.557.700.659.329,00	1.654.280.279.923,00
Total		7.898.819.287.525,00	9.184.725.929.049,00

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten meliputi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Meningkatkan Pemertaan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi; Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa dukungan pendanaan tercantum ditabel berikut.

Tabel 5.2
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi
Banten Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp) Murni	Alokasi Anggaran (Rp) Perubahan
1	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;	671.680.052.340	961.007.073.270
2	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;	1.365.642.997.963	1.465.642.997.963

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp) Murni	Alokasi Anggaran (Rp) Perubahan
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;	2.103.795.577.893	2.603.795.577.893
4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	2.657.700.659.329	3.004.180.279.923
5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	1.100.000.000.000	1.150.100.000.000
Total		7.898.819.287.525	9.184.725.929.049

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional meliputi Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim; Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar; Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dukungan pendanaan terhadap prioritas nasional tercantum ditabel berikut.

Tabel 5.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan	Alokasi Anggaran (Rp) Murni	Alokasi Anggaran (Rp) Perubahan
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	32.579.454.368	33.579.454.368
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1.256.152.327.326	1.830.058.968.850
3	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Minorng Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	59.375.764.600	89.375.764.600
4	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	94.583.876.791	159.583.876.791
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	30.718.087.317	35.718.087.317
6	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1.386.563.908.568	1.686.563.908.568

No.	Prioritas Pembangunan	Alokasi Anggaran (Rp) Murni	Alokasi Anggaran (Rp) Perubahan
7	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	80.200.651.750	191.200.651.750
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.958.645.216.805	5.158.645.216.805
Total		7.898.819.287.525	9.184.725.929.049

Tabel 5.4
Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pendidikan	74 Persen	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	53 Angka	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95.5 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	95.5 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100 Angka	
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	80.5 Angka	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan	100 persen	Dinas Pendidikan
	Tercapainya Peserta Didik yang dapat baca tulis Al Quran	10000 Siswa	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	91 Persen	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	85 Persen	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan	100 Persen	
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan RSUD	100 Persen	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	82 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Risiko Terinfeksi HIV	92.59 Persen	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	100 Persen	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100 Persen	
	Persentase pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	84.90 Angka	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Warga Negara Usia 60 tahun keatas	100 Persen	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang melakukan Skrining Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 tahun	100 Persen	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100 Persen	
	Persentase anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100 Persen	
	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Balita Wasting	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	100 Persen	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Orang Terduga TBC	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100 Persen	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	100 Persen	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84.90 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Balita	100 Persen	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85 Nilai	
	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	100 Persen	
	Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	100 Persen	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	
	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Balita Stunting yang mendapatkan Perawatan/ Pelayanan Kesehatan	100 Persen	
	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	
	Persentase Logistik pelayanan kesehatan Balita	100 Persen	
	Persentase orang dengan risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	92.59 Persen	
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 Persen	
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 Persen	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	0.10 Persen	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94 Persen	
	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	100 Persen	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	
	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	100 Persen	
	Persentase Balita Wasting	100 Persen	
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	100 Persen	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	
	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen	
	Persentase SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Persen	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase P-IRT yang sesuai standar	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	100 Persen	
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	100 Persen	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	100 Persen	
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	70 Persentase	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		80 Persen	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	96,7 Persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	100 Persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	73 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan	51 Persentase	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	65 Persen	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	45 Persen	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks ketangguhan Desa (IKD)	91 Desa/Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100 Persen	
	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100 Persen	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1500 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100 persen	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air Bersih	80.67 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	96.75 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	11.09 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar	50.64 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum	35.4 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	14.14 persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	14.14 persen	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	100 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	0.143 Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	Satuan Pol PP
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	Satuan Pol PP
	Persentase Linmas yang terlatih	55 persen	
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 persen 100 persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial	100 Persen	Dinas Sosial

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	33,33 persen	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32,70 persen	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 Persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP	85 persen	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32,70 persen	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	100 Persen	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	35 Lembaga	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	75 Persen	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Wirausaha Baru	660 Orang	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	96.87 Persen	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	1.25 Persen	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n	8 KK	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	35 Lembaga	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	75 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan terhadap Anak	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DLHK	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup	33 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	33 Persen	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah	1,5 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	1,2Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	85 persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	27 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	62 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah	1,5 Persen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah SKDWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWNI	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	100 Persen	
	Cakupan Perekaman KTP-el	99,47 Persen	
	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	70 Persen	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	99,5 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Kematian	100 Persen	
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan	100 Persen	
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian	100 Persen	
	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Pengesahan Anak	100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata	0,81 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasamanya	0,81 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	14,23 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya fungsi Administrasi DPPKB secara efektif	100 persen	
	Meningkatnya manajemen dan kompetensi ASN DPPKB	100 persen	
	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem informasi pengendalian kependudukan	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan	100 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan GDPK Tingkat kabupaten	2 Kali	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terlaksananya pendidikan kependudukan jalur formal dan informal	3 Kali	
	Terlaksananya pengendalian program Bangga Kencana	20 sekolah	
	Terlaksananya sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga	1 kali	
	Terlaksananya sosialisasi Pemanfaatan kajian dampak kependudukan	4 Kegiatan	
	Tersediaannya data dan sosialisasi IPBK	103 orang	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	95 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	70 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	92.25 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fungsi Administrasi DPPKB secara efektif	100 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya manajemen dan kompetensi ASN DPPKB	100 persen	
	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	
	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 persen	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	95 Persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	70 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	66,67 Persen	Dinas Perhubungan
	Persentase Perlangkapan Jalan	75 Persen	
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	2 jaringan	
	Terminal yang terbangun	1 Terminal	
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0,5 Angka	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	66,67 Persen	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	2 Jaringan	
	Terminal yang terbangun	1 Terminal	
	Persentase Perlangkapan Jalan	75 Persen	
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0,5 Angka	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	66,67 Persen	Dinas Perhubungan
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0,5 Angka	
	Terminal yang terbangun	1 Terminal	
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	2 Jaringan	
	Persentase Perlangkapan Jalan	75 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	80 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase layanan kemanan informasi	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	21.43 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemingkatan.	27.03 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	17.86 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	26.79 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	3.1 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	2.14 Persen	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	1,60 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP	100 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi	25 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	75 Persen	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	33,33 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	79,0 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	74 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online	80 Persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	70 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan	40 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	75 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	70 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	50 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	100 Persen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0,6 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	1,5 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	1,5 Persen	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	67,34 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	100 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	16.90 Persen	
		100 Persen	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	1 dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	82,63 Persen	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	80 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	50 Pesen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	60 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	40 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	86 Persen	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	90 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	75 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	65.93 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP	95,24 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	30 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	28.72 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	25,05 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	25,05 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori Sedang	Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Cukup	
	Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	100 Persen	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	100 persen	Sekretariat Daerah
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	100 Persen 100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	Sekretariat DPRD
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	64 Persen 100 Persen	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
	Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
	Persentase OPD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan	75 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan		
KEUANGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	79 Persen	
	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	100 Persen	
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pencapaian Kinerja Akuntansi Daerah (Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran	95 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Pencapaian Kinerja Anggaran Daerah (Rata rata dari Persentase pencapaian Mandatory Spending, Persentase Kesesuaian Waktu Penyusunan KUA PPAS, Persentase Kesesuaian Waktu penyampaian Nota Keuangan, Persentase Kesesuaian Waktu Perstujuan RAPBD)	98.25 Persen	
	Persentase Pencapaian Waktu Pencairan Kas Daerah Berdasarkan Kesesuaian Dokumen Pencairan	100 Persen	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rata rata dari Persentase pengajuan sertifikasi Aset dan Persentase capaian pencatatan data aset	97 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang digunauasakan	85 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEPEGAWAIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	16 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	40 Nilai	
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	24 Nilai	
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	40 Nilai	
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	80 Nilai	
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	72,5 Nilai	
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40 Nilai	
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	40 Nilai	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Aspek Pengembangan Karier	72,5 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	80 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	40 Nilai	
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	72,5 Nilai	
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40 Nilai	
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	40 Nilai	
	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	16 Nilai	
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	40 Nilai	
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	24 Nilai	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	66,07 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	100 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa	100 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91,90 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Tigaraksa

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90,25 Persen	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	95 Persen	Kecamatan Cikupa
	Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart	100 Persen	
		100 Persen	
		95 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90,25 Persen	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Panongan	100 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 Persen	Kecamatan Panongan
	Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart Kec. Panongan		
		94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan	28.57 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kec. Panongan	100 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Panongan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan	100 Persen	Kecamatan Panongan
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	98,30 Persen	Kecamatan Curug
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug	84 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug	80 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	73 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	81 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	89,30 Persen	Kecamatan Curug
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Legok

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Legok
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Balaraja	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Balaraja
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Kresek	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kresek
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Kronjo	100 Persen	Kecamatan Kronjo

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kronjo
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Mauk
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Rajeg
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Sepatan
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuh Kec. Teluknaga penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Teluknaga

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 Persen	Kecamatan Teluknaga
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Teluknaga
	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Teluknaga
	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Teluknaga
	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Teluknaga
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Cisoka
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kosambi
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kosambi

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan	100 Persen	Kecamatan Pagedangan
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang Terpelihara	100 persen	Kecamatan Pagedangan
	Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan	100 persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90 persen	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	80 persen	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 persen	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	95 persen	Kecamatan Pagedangan
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90 persen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Jambe
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Jayanti
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kemiri
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kemiri

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjut	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri	100 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	92 Persen	Kecamatan Sukadiri
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri	89,5 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	79 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90 Persen	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Cisauk
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjut	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjut	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,90 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan peenyenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	91,90 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	87 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	71,43 Persen	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	91,94 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Solear	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	90 Persen	Kecamatan Solear
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	78 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	50 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Solear	100 Persen	Kecamatan Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Mekar Baru	100 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	58 Persen	Kecamatan Mekar Baru
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	63 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	58 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	65 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	70 Persen	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	67 Persen	Kecamatan Mekar Baru

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	PD Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	Kecamatan Gunung Kaler
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	0,09 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	8,61 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	14,29 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,91 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	12,94 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahul, diprioriaskan pula untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Capaian dan target pembangunan yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten disajikan tabel 5.5.

Tabel 5.5
Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2020-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
1.	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN									
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	66,52	99,26	98.13	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		49,42	51,59	54,42	56,68	53,94	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		37,1	39,54	41,54	42,45	40,27	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		56,43	60,03	63,03	66,07	63,12	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		52,4	52,97	54,97	56,94	54,80	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SD	nilai		75,31	81,91	85,00	88,99	85,07	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	nilai		63,28	86,23	88,00	91,21	87,26	Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SD	nilai		71,12	73,76	75,00	79,96	76,38	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai		74,49	75,96	80,00	82,64	80,21	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	nilai		64,12	75,42	77,00	79,84	77,33	Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SMP	nilai		65,92	72,94	75,00	79,14	76,36	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	69,90	74,21	96.63	80	100	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	68,09	82,49	67.65	80	100	100	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan	%		59,21	54,58	54,60	54,64	62,10	Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
		Minimal Akreditasi B								
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%		69,10	55,16	56,00	57,96	63,00	Dinas Pendidikan
2.	BIDANG URUSAN KESEHATAN									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	99,04	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	99,77	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,57	92,38	98,07	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	89,32	96,32	95,08	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,24	86,33	98,61	70	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	84,45	70,80	97,27	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,62	87,34	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,65	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	76,66	90,71	96,45	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,42	72,19	98,75		100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	76,43	69,67	100	90	100	100	Dinas Kesehatan
3.	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM									
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	36,46	34,78	72,43	60	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,52	2,11	91,89	20	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
4.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni	%	15,00	62,50	100	35	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	66,27	100	50	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	100	100	99.54	100	100	100	Satuan Pol PP
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	59,56	100	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	92.8	100	100	100	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	78,11	84,29	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	78,36	86,38	96.95	100	100	100	BPBD
6.	BIDANG URUSAN SOSIAL									
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20,29	75,82	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,28	84,82	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,47	84,63	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	65,55	90,00	93.33	80	100	100	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	40	69,91	88.37	80	100	100	Dinas Sosial

Sumber: Laporan SPM Tahun 2021, 2022

Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6

Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
A	SPM Bidang Pendidikan		
	SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH		
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/ Kesetaraan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/ Kesetaraan
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 tahun Kesetaraan		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/ Kesetaraan
	SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR LITERASI NUMERASI		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	1. Rata-rata kemampuan Literasi Siswa berdasarkan asesmen nasional		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP
	2. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Paud, SD dan SMP
			Pemyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SD dan SMP
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan SD dan SMP
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SD dan SMP
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	SUB KEGIATAN INDIKATOR PAUD		
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
	SUB KEGATAN		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	INDIKATOR IKLIM KEAMANAN, IKLIM KIEBHINEKAAN DAN IKLIM INKLUSIVITAS		
	Indeks Iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD dan SMP
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi SD dan SMP
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidik SD dan SMP
B	SPM Bidang Kesehatan		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
6	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
7	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
8	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
9	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
10	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
			Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
2	Pelayanan informasi rawan bencana		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
			Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
			Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	kebakaran		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana dan Prasarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
F	SPM Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
			Pelayanan Dukungan Psikososial

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2025

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari sumber Pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi. Kebijakan TKD pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

1. mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui
 - a. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan *stunting*;
 - c. penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d. pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f. peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan *monitoring* dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu:

1. Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU)

- yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik;
2. Dana Insentif Daerah (DID);
 3. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta;
 4. Dana Desa.

TKDD Tahun 2025 menurut jenis transfer sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah:

(a) mengoptimalkan kebijakan DBH *earmarked* yaitu:

- (i) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
 - (ii) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.
- (b) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk daerah yang berbatasan langsung;
- (c) menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
- (d) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;
- (e) mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki DBH yang tinggi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dengan arah kebijakan adalah

- (a) melanjutkan kebijakan *Hold Harmless* sehingga alokasi DAU setiap pemerintah daerah tidak mengalami penurunan;
- (b) menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan kualitas data dasar perhitungan alokasi;
- (c) mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk pemenuhan SPM melalui
 - (i) perhitungan alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan biaya dan target layanan dasar;
 - (ii) sinergi penyusunan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah.
- (d) mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konservasi

- hutan) sebagai perhitungan faktor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
- (e) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator SPM untuk seluruh daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan adalah:

1. memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
2. memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah, serta DAK dengan sumber pendanaan lainnya.
3. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan untuk masing-masing DAK adalah sebagai berikut:

(a) Dana Alokasi Khusus Fisik

- (i) mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
- (ii) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh;
- (iii) mengurangi angka *stunting* melalui pembangunan infrastruktur dasar;
- (iv) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
- (v) mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;
- (vi) memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
- (vii) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
- (viii) mengukur capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) sebagai salah satu instrumen *monitoring* dan evaluasi DAK Fisik;
- (ix) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
- (x) mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD.

(b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik

- (i) mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- (ii) memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
- (iii) mendorong penuntasan target PN;
- (iv) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;

(v) meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

(c) Hibah Daerah

Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk:

- (i) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
- (ii) penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
- (iii) peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah *urban*. Evaluasi hibah ke daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni) dan pengalihan/pengintegrasian dengan DAK Fisik.

4. Dana Desa

Arah kebijakan umum dana desa antara lain:

- (a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu
 - (i) berkurangnya 8.000 desa tertinggal dan meningkatnya 10.000 desa mandiri;
 - (ii) menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan
 - (iii) revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- (b) mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2025;
- (c) memprioritaskan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;
- (d) melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa;
- (e) menyempurnakan formula pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula, penetapan afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk;
- (f) mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;
- (g) memperkuat pemantauan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan dana desa;
- (h) menguatkan peran pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan dana desa;
- (i) mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan valid sebagai basis pengambilan kebijakan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka

- (a) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
- (b) dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;

- (c) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;
- (d) operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
- (e) dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus
- (j) permodalan BUMDes;
- (k) pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM;
- (l) akses perbankan masyarakat desa;
- (m) akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa;
- (n) perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- (o) diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya;
- (p) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
- (q) peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.
- (r) dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan:
 - (i) sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa;
 - (ii) sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - (iii) akses dan moda transportasi desa;
 - (iv) pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa;
 - (v) penyediaan fasilitas pendidikan;
 - (vi) daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta
 - (vii) pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.

Sinkronisasi serta keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) setiap tahun sekali yang merupakan tahapan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Rakortekbang antara pemerintah pusat melalui K/L melakukan koordinasi dan kesepakatan terhadap usulan dari daerah yang sesuai dengan prioritas nasional tahun 2025. Berikut usulan yang disampaikan dalam Rakortekbang tahun 2023 untuk Tahun 2025 dari KabupatenTangerang.

Tabel 5.7
Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

NO	NASIONAL	USULAN DAERAH					DUKUNGAN KESIAPAN DAERAH		SKPD PENANGGUNGJAWAB
	MAJOR PROJECT	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RINCIAN OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp.)/Milyard	DETAIL LOKASI	SUB KEGIATAN (APBD)	URAIAN DUKUNGAN	
1	Penghubung Jembatan Anatra Provinsi Banten dan JawaBarat	Pembangunan Jembatan Penghubung (Kali Cimanceuri) Kp.Lebaksari (Desa Mekarwangi) Cisauk dengan Kp. Tarogong (Desa Mekarsari) Rumpin Bogor	31 x 8 M	2025	20 Milyar	Desa Mekar wingi Cisauk Tangerang dan Desa mekarsari Bogor	Pembangunan Jalan & Jembatan	1. Lahan Terbebaskan (peta bidang lahan) 2. Dokumen FS, DED, Kajian Hidrologi 3. Dokumen Andalalin 4. Dokumen Lingkungan	Balai Prasarana & Pemeliharaan Jalan Nasional (P2JN) Banten dan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Tigaraksa	1 Paket	2025	60 Milyar	Tigaraksa Kabuoaten Tangerang	Pengadaan Sarana	1. Rekomtek	1. Kementerian Kesehatan 2. Dinas Kesehatan Kab. Tangerang
3	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Pembangunan IPLT Balaraja	Kapasitas 1.000 ltr/dt	2025	40 Milyard	Kecamatan Balaraja	Pembangunan IPLT	1. Tersedia Lahan 1 Ha 2. Dokumen FS, DED 3. Dokumen Lingkungan	Dinas Perumahan, Permukiman & pemakaman

Sumber : Usulan Daerah Kab Tangerang, 2024

5.4 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2025 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan tahun 2025 disajikan dalam lampiran.

BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai wujud pelaksanaan Tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 serta Tahun pertama Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025- 2045 Kabupaten Tangerang.

Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kebijakan yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Kaidah dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA-PD) Tahun 2025.
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
4. Dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Daerah maka perlu dilaksanakan Perubahan RKPD tahun 2025.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing- masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
8. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID